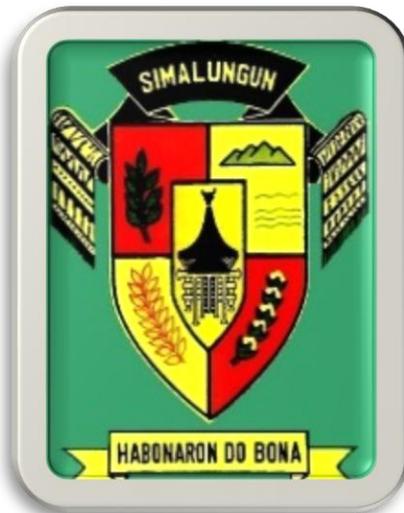


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) TA. 2024

Pemerintah Kabupaten Simalungun



KABUPATEN SIMALUNGUN
2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan yang telah diperjanjikan oleh Bupati Simalungun Tahun 2024 dan tetap berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.

Kepala Perangkat Daerah pada perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tetap berdasar pada Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bandar Tahun 2021-2026. Dengan mempedomani Indikator Kinerja Utama, maka Misi Kabupaten Simalungun dan juga Jumlah Indikator dapat diuraikan sebagai berikut :

- Misi 1 (satu), 5 (lima) dan 6 (enam) dengan jumlah sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran, dan 5 (lima) indikator kinerja utama.
- Misi 2 (dua), 4 (empat) dan 8 (delapan) dengan jumlah 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama
- Misi 3 (tiga), 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dengan jumlah 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama
- Misi 7 (tujuh) dengan jumlah 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja utama

Berikut adalah rincian realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024:

Tabel
Capaian atas indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.67	4.89	133%	Sangat Memuaskan
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2.00	0.78	39%	Kurang
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2.5	1.82	0,728	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4.68	5.26	112%	Sangat Memuaskan
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	4.8	14.54 %	302%	Sangat Memuaskan
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	7.49	7.72	97%	-
		Indeks Gini	Indeks	0.270	0.2950 (2023)	91%	Sangat Memuaskan
		Pendapatan Perkapita	Juta Rp	53.90	58.90	109%	Sangat Memuaskan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
5.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.19	6.12	65%	Cukup
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.18	75.88	100.9%	Sangat memuaskan
		Indeks Kesehatan	Indeks	80.11	79.85	99%	Sangat memuaskan
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	Indeks	70.17	93.00 (2023)	132%	Sangat memuaskan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.08	93.09 (2023)	100%	Sangat memuaskan
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60.00	49.55	82%	Memuaskan
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	Indkes	61.67 (B)	62.47	101%	Sangat Memuaskan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	60.00 (B)	52.02 (cc)	86%	Memuaskan
		Opini BPK	Indeks	WTP	WTP (2023)	100%	Sangat Memuaskan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	Indeks	70.00	70.512	94%	Sangat Memuaskan
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67.00	85.69	127%	Sangat Memuaskan
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Indkes	30.10	41.49 (Inovativ)	137%	Sangat Memuaskan
11.	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	Indeks	22.47	-	-	-
12.	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Indeks	72.50	89.07	81%	Memuaskan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintah yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Simalungun. Hal ini juga sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuju terciptanya **Good Government** dan **Clean Government**. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari Kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang merupakan sarana pelaporan kinerja untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) serta media pertanggungjawaban kinerja yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian tujuan, sasaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan, kiranya dapat dievaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang

Pamatang Raya, 19 Mei 2025

BUPATI SIMALUNGUN



Anton Achmad Saragih

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun	4
1.3.1.Geografis	4
1.3.1.1. Luas dan Batas Wilayah	4
1.3.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	5
1.3.1.3. Morfologi dan Topografi	7
1.3.1.4. Hidrologi.....	9
1.3.1.5. Penggunaan Lahan	9
1.3.1.6. Kawasan Strategis	10
1.3.2.Demografi.....	11
1.3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	11
1.3.2.2. Perekonomian.....	14
a. Produk Domestik Regional Bruto	14
b. Struktur Perekonomian.....	14
1.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	15
1.3.2.4. Ketenagakerjaan.....	16
1.4. Sistematika Penulisan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026	21
2.2. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026	21
2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	25
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	31
3.1.1. Klasifikasi Penilaian Capaian	35
3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2024	36
3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Kabupaten Simalungun Tahun 2024.....	38
3.2. Relisasi Anggaran	147
 BAB IV PENUTUP	 149
4.1. Kesimpulan	149
4.2. Rekomendasi	152

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	4
Tabel 1.2 Luas wilayah Kabupaten Simalungun Berdasarkan Ketinggain.....	8
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kab. Simalungun Tahun 2024	12
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Simalungun, 2020, 2024, dan 2025	13
Tabel 1.5 Peran PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)	15
Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun Tahun 2020- 2023-2024	16
Tabel 2.1 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Startegi.....	25
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Simalungun Tahun 2023	34
Tabel 3.2 Capaian Sasaran I Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Simalungun Tahun 2023.....	36
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan.....	37
Tabel 3.4 : Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun, 2019 – 2023.....	38
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2 (Dua)	39
Tabel 3.5 Kontribusi PDRB Pariwisata Kabupaten Simalungun Tahun 2023	39
Tabel 3.6 Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 Dan 2023 Di Kabupaten Simalungun.....	43
Tabel 3.7 Data Industri Pengolahan Di Kabupaten Simalungun	44
Tabel 3.8 Capaian Sasaran 2 (Dua)	45
Tabel 3.9 Hasil produktifitas pertanian Kabupaten Simalungun.....	46
Tabel 3.10 Capaian Sasaran 3 (tiga)	51
Tabel 3.11 Perizinan yang diselesaikan oleh Dinas PTSP.....	52
Tabel 3.12 Capaian Sasaran 4 (empat)	53

Tabel 3.13 Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2023.....	53
Tabel 3.14 Indeks Gini Kabupaten Simalungun	54
Tabel 3.15 PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/ Kota Atas Dasa Berlaku	56
Tabel 3.16 Capaian Kinerja dari Sasaran 5 (Lima)	57
Tabel 3.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	58
Tabel 3.18 Persentase Tenaga Kerja yang tersertifikasi	58
Tabel 3.19 Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Disnaker sepanjang tahun 2023	63
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Sasaran 6 (enam).....	65
Tabel 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponen IPM Kabupaten Simalu (2022-2023).....	65
Tabel 3.22 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota.....	66
Tabel 3.23 Imunisasi Lengkap Tahun 2023	68
Tabel 3.24 Capaian Sasaran 7 (Tujuh).....	71
Tabel 3.25 Rata – rata lama sekolah.....	72
Tabel 3.26 Jumlah Sekolah di Kab. Simalungun	73
Tabel 3.27 Jumlah Guru Paud, SD, SMP di Kab. Simalungun	74
Tabel 3.28 Jumlah Pendidikan Paket	74
Tabel 3.29 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG Tahun 2022	76
Tabel 3.30 Capaian Sasaran 8 (delapan)	77
Tabel 3.31 Capaian Sasaran 9 (Sembilan).....	79
Tabel 3.32 Capaian Sasaran 10 (Sepuluh)	83
Tabel 3.33 Capaian Sasaran 11 (Sebelas)	90
Tabel 3.34 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Kecamatan Di Kabupaten Simalungun (km) 2023.....	92
Tabel 3.35 Capaian Sasaran 12 (Duabelas)	93
Tabel 3.36 Saluran irigasi di Kab. Simalungun	94
Tabel 3.37 Jaringan Irigas yang di rehabilitasi	96
Tabel 3.38 Capaian Kinerja Sasaran 13 (Tigabelas).....	99
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Sasaran 14 (Empatbelas)	99
Tabel 3.40 Capaian Kinerja Sasaran 15 (limabelas)	102
Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan	

Tahun Sebelumnya (2022)	103
Tabel 3.42 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen dokumen perencanaan strategis organisasi	115
Tabel 3.43 Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja tahun 2023	117
Tabel 3.44 Realisasi Belanja Tahun 2023	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaporan Kinerja merupakan kewajiban bagi setiap instansi merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi *kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas*. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah



ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Mengacu atau berpedoman pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 dan juga Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Simalngun Tahun 2024 dan juga Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024, selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Simalungun, maka Penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini berisi Ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Ligkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016



Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dearah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026



1.3. Gambaran Umum Kabupaten Simalungun

1.3.1. Geografis

1.3.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Simlangun terdiri dari 32 Kecamatan, 386 Nagori (Desa) dan 27 Kelurahan, dengan kecamatan terluas adalah kecamatan Hatonduhan (7,69%) sedangkan kecamatan terkecil adalah kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi (0,89%). Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Simalungun adalah;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo;
- Sebelah Tengah berbatasan dengan Kotamadya Pematang Siantar.

Tabel 1.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nagori	Kalurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Silimakuta	6	1	74,16	1,70
2	Pematang Silimahuta	10	0	79,68	1,82
3	Purba	13	1	172,71	3,95
4	Harangaol Horison	4	1	40,97	0,94
5	Dolok Pardamean	11	0	67,90	1,55
6	Sidamanik	14	1	80,88	1,85
7	Pematang Sidamanik	9	1	137,80	3,15
8	Girsang Sipangan Bolon	3	3	129,89	2,97
9	Tanah Jawa	19	1	174,33	3,99
10	Hatonduhan	9	0	336,26	7,69
11	Dolok Panribuan	15	0	148,62	3,40
12	Jorlang Hataran	12	1	93,70	2,14
13	P a n e i	16	1	77,96	1,78
14	Panombean Panei	11	0	73,74	1,69
15	R a y a	12	5	261,56	5,98
16	Dolog Masagal	9	0	105,77	2,42
17	Dolok Silou	14	0	302,66	6,92



No	Kecamatan	Nagori	Kalurahan	Luas Wilayah	
				Km	Persentase
18	Silou Kahean	16	0	228,74	5,23
19	Raya Kahean	13	1	204,89	4,69
20	Tapian Dolok	10	1	119,89	2,74
21	Dolok Batu Nanggar	14	2	106,91	2,45
22	S i a n t a r	17	0	73,99	1,69
23	Gunung Malela	16	0	96,74	2,21
24	Gunung Maligas	9	0	51,39	1,18
25	Hutabayu Raja	15	1	191,43	4,38
26	Jawa Maraja Bah Jambi	8	0	38,97	0,89
27	Pematang Bandar	8	2	88,16	2,02
28	Bandar Huluan	11	0	107,33	2,45
29	B a n d a r	10	2	100,69	2,30
30	Bandar Masilam	14	0	91,22	2,09
31	Bosar Maligas	10	1	285,43	6,53
32	Ujung Padang	16	1	228,49	5,23
SIMALUNGUN		386	27	4 372,50	100,00

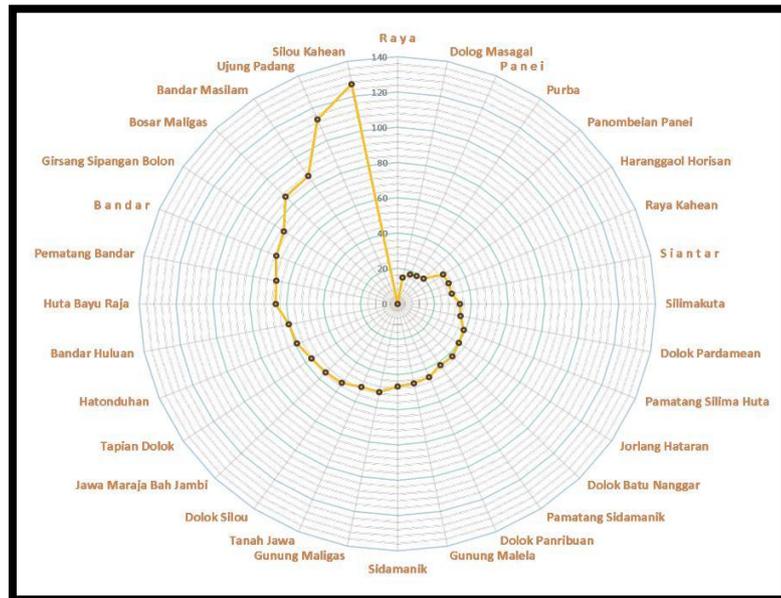
Sumber : Dokuemn RTRW Kabupaten Simaulngun 2011-2031, Bapprida Kab. Simalungun

1.3.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Simalungun adalah merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki Potensi Sumber Daya yang banyak. Kabupaten Simalungun secara keseluruhan memiliki luas administrasi atau 5,99 dari luas Provinsi Sumatera Utara. Wilayah Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1400mdpl, 75% lahannya berada pada kemiringan 0-15%. Adapun letak astronomisnya antara 02°36'-03°18' Lintang Utara dan 98°32'-99°35' Bujur Timur dengan luas 372,5km².

Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ke-3 setelah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara serta berada di Kawasan Danau Toba-Parapat (BPS Provinsi Sumut, 2024). Rata-rata jarak tempuh dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Simalungun menuju Ibu Kota kabupaten adalah 51,42 km, dimana jarak

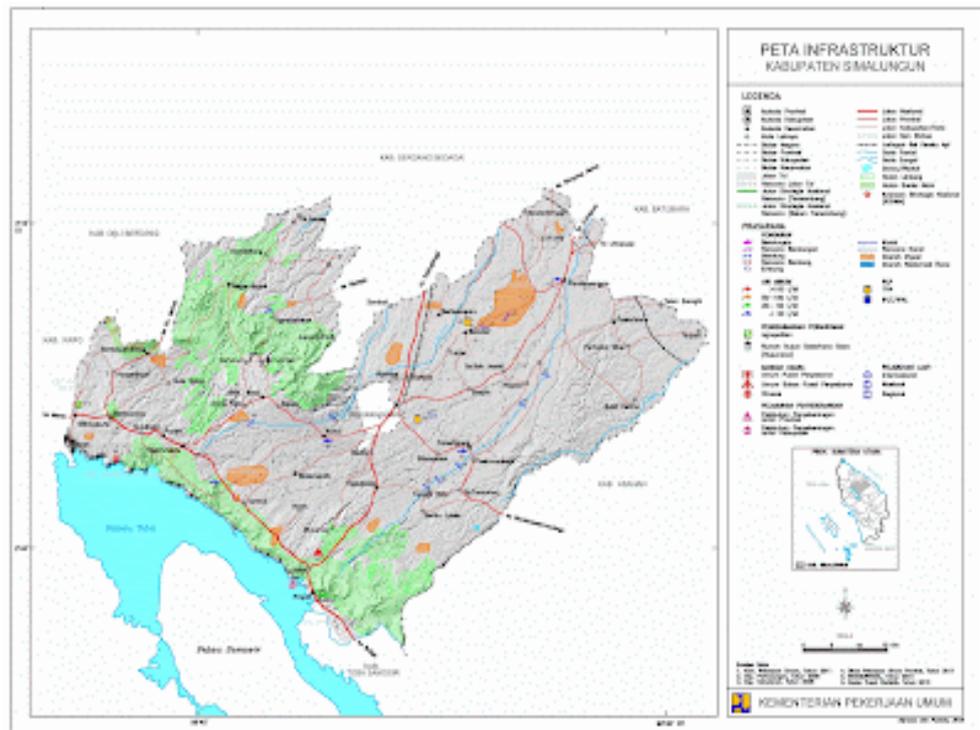
terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean sejauh 127 km dan Kecamatan Ujung Padang sejauh 113 km



Gambar: Jarak Antara Kecmatan dengan Ibukota Kabupaten Simaungun

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025

Gambar 1.3 Peta Kabupaten Simalungun



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



1.3.1.3. Morfologi dan Topografi

Kabupaten Simalungun berada pada ketinggian 20-1.400 m diatas permukaan laut (rata-rata 3.369m) dan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori wilayah berdasarkan ketinggian, yaitu:

- a. Daerah dengan ketinggian 20m-389m dari permukaan laut termasuk dalam kategori dataran rendah yang meliputi Kecamatan Bandar, Pematang Bandar, Ujung Padang, Siantar, Huta Bayu Raja, Tanah Jawa, Bosar Maligas, Dolok Baru Nanggar dan Tapian Dolok dengan luas 2.160,83 km atau 49,26% dari luas Kabupaten Simalungun.
- b. Daerah dengan ketinggian 600-920 mdpl termasuk dalam kategori dataran sedang yang meliputi Kecamatan Panei, Jorlang Hataran, Raya Kahean, Sidamanik, Raya, Dolok Panribuan dan Girsang Sipangan Bolon dengan luas 1.276,07 km atau 29,09% dari luas Kabupaten Simalungun.
- c. Daerah dengan ketinggian 1.100-1400 mdpl dalam kategori dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Dolok Pardamean, Purba, Silimakuta, Silau Kahean dan Dolok Silau dengan luas 939,70 atau 21,65 % dari luas Kabupaten Simalungun

Dengan Topografi, cuaca dan curah hujan yang mencukupi menjadikan Kabupaten Simalungun terkenal sebagai daerah penghasil (lumbung) beras dan perkebunan dengan mata pencaharian penduduk Sebagian besar adalah dari usaha pertanian, tanaman pangan dan perkebunan baik dalam skala besar maupun perkebunan rakyat.

Luas wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.2
Luas wilayah Kabupaten Simalungun
Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (ha)
1	≤ 100	83.738
2	101 – 500	161.230
3	501 – 1000	92.392
4	1001 – 1500	99.701
5	≥ 1501	1599

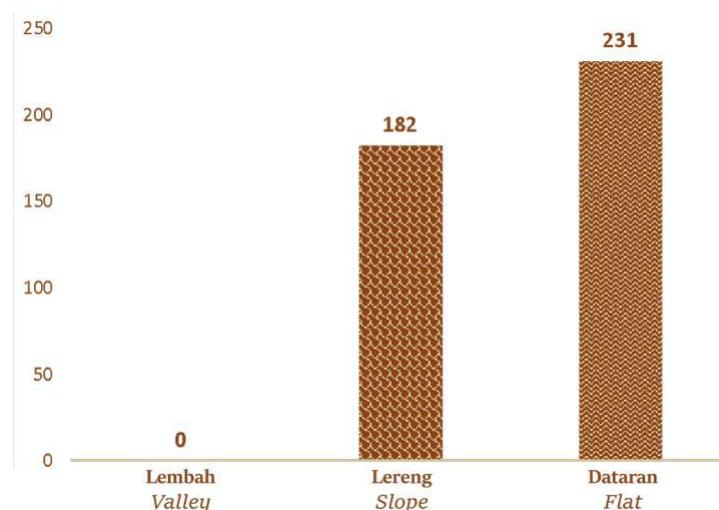
Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Simalungun 2011-2031, Bapperida Kab. Simalungun

Dengan Posisi Letak Kabupaten Simalungun yang berada di dataran rendah hingga tinggi menyebabkan posisi kemiringan lahan juga berbeda-beda. Penyebaran kemiringan lahan/lereng di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari :

- Kemiringan datar (0-2%)
- Landai (2-15%)
- Bergelombang/berbukit (15-40%)
- Dan curam (> 40%)

Luas lahan/ lereng di Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah
di Kabupaten Simalungun, 2024



Sumber : Simalungun Dalam Angka, 2024



1.3.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Simalungun terdiri dari atas air permukaan yaitu sungai, rawa dan air bawah tanah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU nomor 11.A/PRT/M/2006 tentang Sungai dan Satuan Wilayah Sungai, maka sungai-sungai di wilayah Kabupaten Simalungun berdasarkan lintas wilayahnya termasuk WS Belawan Ular Padang, WS Toba Asahan, WS Wampu Besitang, WS Bah Bolon dan DAS sebagai diantaranya:

- a. DAS Silou
- b. DAS Wampu
- c. DAS Bedagai
- d. DAS Asahan
- e. DAS Padang
- f. DAS Silou Tua
- g. DAS Ular
- h. DAS Bahapal
- i. DAS Bah Bolon

Wilayah sungai lintas Kabupaten, meliputi wilayah Sungai Bah Bolon, Bah Tongguran, Bah Hapal, dan Bah pamujian serta sungai-sungai kecil/mata air. Di Kabupaten Simalungun juga terdapat banyak air terjun yang menyebar hampir seluruh kecamatan di Kawasan dataran tinggi yang ada di Kabupaten Simalungun.

1.3.1.5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Simalungun sangat bervariasi, yaitu terdiri dari atas penggunaan untuk pemukiman, persawahan, tegalan/kebun campuran, perkebunan besar,



perkebunan rakyat, hutan, semak/alang-alang, kolam/tambak, rawa-rawa, dan beberapa jenis penggunaan lahan lainnya. Secara umum, penggunaan lahan secara keseluruhan di dominasi untuk sektor pertanian dan perkebunan.

Penggunaan lahan terluas di Kabupaten Simalungun sendiri terdiri dari sawah seluas 31.021 Ha (7,14%), lahan pertanian bukan sawah (tegal/kebun, ladang, perkebunan rakyat, padang penggembalaan/rumput, hutan negara, tambak, kolam empang dll) seluas 357.111 Ha (84,54%), bukan lahan pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll) seluas 27.518 Ha (8,3%).

Adanya perkembangan penduduk dan kegiatannya, kemajuan perekonomian masyarakat dan pengaruh kemajuan teknologi dan informasi serta perubahan nasional dan global mendorong terjadinya perubahan pemilihan lokasi pemukiman dan kegiatan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti industri, transportasi dan pertambangan cukup cepat dan mengubah pola pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang tersebut bertambah luas namun bersifat lebih terkonsentrasi dan tidak tersebar.

1.3.1.6. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.



Kawasan Strategis nasional dan Kawasan Strategis Provinsi wilayah kabupaten seperti:

- a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Danau Toba dan sekitarnya untuk kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Simalungun meliputi Kawasan Strategis Agropolitas Dataran Tinggi untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Silimakuta, Kawasan Strategis Tebing Tinggi – Siantar untuk pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Dolok Batu Nanggar dan Kecamatan Tapian Dolok, dan Kawasan Strategis Simalungun – Batubara – Asahan dan Sekitarnya (mencakup didalamnya KEK-Sei Mangkei). Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dilakukan melalui perwujudan Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya serta Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

1.3.2. Demografi

1.3.2.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Simalungun bersumber dari hasil Proyeksi Penduduk Hasil SP2020 tahun 2020 - 2035 (Pertengahan Tahun/Juni) sebanyak 1.067.499 jiwa yang terdiri atas 537.650 jiwa penduduk laki-laki dan 529.849 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 244 orang per km persegi,



sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2020-2025 sebesar 1,59 persen

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,22 persen, 15-64 tahun sebesar 67,79 persen dan usia 65 tahun ke atas sebesar 7,99 persen yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Simalungun, 2024

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio JK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silimakuta	9.644	9.722	19.366	99,20
Pamatang Silima Huta	7.463	7.437	14.900	100,35
Purba	15.379	14.867	30.246	103,44
Haranggaol Horisan	4.092	4.070	8.162	100,54
Dolok Pardamean	8.194	7.946	16.140	103,12
Sidamanik	16.085	16.191	32.276	99,35
Pamatang Sidamanik	10.723	10.509	21.232	102,04
Girsang Sipangan Bolon	9.772	9.867	19.639	99,04
Tanah Jawa	29.508	28.854	58.362	102,27
Hatonduhan	14.521	14.714	29.235	98,69
Dolok Panribuan	12.107	11.755	23.862	102,99
Jorlang Hataran	10.416	10.536	20.952	98,86
P a n e i	15.790	16.039	31.829	98,45
Panombeian Panei	14.001	13.878	27.879	100,89
R a y a	16.211	16.374	32.585	99,00
Dolog Masagal	7.787	7.831	15.618	99,44
Dolok Silou	9.804	9.847	19.651	99,56
Silou Kahean	10.236	10.185	20.421	100,50
Raya Kahean	11.791	11.726	23.517	100,55
Tapian Dolok	24.642	23.329	47.971	105,63
Dolok Batu Nanggar	24.377	23.781	48.158	102,51
S i a t a r	38.993	38.854	77.847	100,36
Gunung Malela	22.875	22.352	45.227	102,34
Gunung Maligas	19.325	18.117	37.442	106,67
Huta Bayu Raja	18.979	19.248	38.227	98,60
Jawa Maraja Bah Jambi	11.992	12.027	24.019	99,71
Pematang Bandar	21.260	20.804	42.064	102,19
Bandar Hulan	15.551	15.360	30.911	101,24
B a n d a r	43.708	42.442	86.150	102,98
Bandar Masilam	16.383	16.242	32.625	100,87
Bosar Maligas	22.689	22.125	44.814	102,55
Ujung Padang	23.352	22.820	46.172	102,33
Simalungun	537.650	529.849	1.067.499	101,47

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025



Tabel: 1.4
 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di
Kabupaten Simalungun, 2020, 2024, dan 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)		Persentase Penduduk		
	2020	2024	2025	2020-2024	2020-2025	2020	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Silimakuta	17.479	18.979	19.366	2,22	2,18	1,77	1,80	1,81
Pamatang Silima Huta	13.390	14.589	14.900	2,31	2,28	1,35	1,39	1,40
Purba	27.536	29.692	30.246	2,03	2,00	2,78	2,82	2,83
Haranggaol Horisan	7.041	7.927	8.162	3,21	3,16	0,71	0,75	0,76
Dolok Pardamean	15.136	15.939	16.140	1,39	1,36	1,53	1,52	1,51
Sidamanik	30.853	31.996	32.276	0,97	0,95	3,12	3,04	3,02
Pamatang Sidamanik	19.716	20.926	21.232	1,60	1,57	1,99	1,99	1,99
Girsang Sipangan Bolon	17.941	19.293	19.639	1,96	1,92	1,81	1,83	1,84
Tanah Jawa	54.900	57.670	58.362	1,32	1,30	5,54	5,48	5,47
Hatonduhan	26.632	28.703	29.235	2,02	1,98	2,69	2,73	2,74
Dolok Panribuan	22.018	23.488	23.862	1,74	1,71	2,22	2,23	2,24
Jorlang Hataran	19.154	20.585	20.952	1,94	1,91	1,93	1,96	1,96
P a n e i	28.326	31.105	31.829	2,53	2,49	2,86	2,96	2,98
Panombeian Panei	24.993	27.284	27.879	2,37	2,33	2,52	2,59	2,61
R a y a	30.150	32.092	32.585	1,68	1,65	3,04	3,05	3,05
Dolog Masagal	13.406	15.153	15.618	3,32	3,27	1,35	1,44	1,46
Dolok Silou	17.696	19.249	19.651	2,27	2,23	1,79	1,83	1,84
Silou Kahean	19.477	20.235	20.421	1,02	1,00	1,97	1,92	1,91
Raya Kahean	21.583	23.124	23.517	1,86	1,82	2,18	2,20	2,20
Tapian Dolok	45.032	47.383	47.971	1,37	1,34	4,55	4,50	4,49
Dolok Batu Nanggar	45.659	47.662	48.158	1,15	1,13	4,61	4,53	4,51
S i a t a r	73.536	76.989	77.847	1,23	1,21	7,43	7,32	7,29
Gunung Malela	41.189	44.403	45.227	2,02	1,99	4,16	4,22	4,24
Gunung Maligas	33.734	36.681	37.442	2,26	2,22	3,41	3,49	3,51
Huta Bayu Raja	35.426	37.661	38.227	1,64	1,61	3,58	3,58	3,58
Jawa Maraja Bah Jambi	22.892	23.796	24.019	1,04	1,02	2,31	2,26	2,25
Pematang Bandar	38.688	41.379	42.064	1,81	1,78	3,91	3,93	3,94
Bandar Huluan	29.484	30.629	30.911	1,02	1,00	2,98	2,91	2,90
B a n d a r	79.006	84.697	86.150	1,87	1,84	7,98	8,05	8,07
Bandar Masilam	30.015	32.095	32.625	1,80	1,77	3,03	3,05	3,06
Bosar Maligas	43.355	44.532	44.814	0,72	0,70	4,38	4,23	4,20
Ujung Padang	44.803	45.909	46.172	0,65	0,64	4,52	4,36	4,33
Simalungun	990.246	1.051.845	1.067.499	1,62	1,59	100,00	100,00	100,00

Sumber: Simalungun Dalam Angka, 2025



1.3.2.2. Perekonomian

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Simalungun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 sebesar Rp 52,239 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kontributor utama dengan peranan mencapai Rp 28,406 triliun (54,38 %). Selanjutnya diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp 8,221 triliun (15,74 %). Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 29,88 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Simalungun. Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Simalungun pada tahun 2024 sebesar Rp 31,510 triliun. Kategori Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,35 persen, diikuti oleh Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,12 persen kemudian Kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,73 dan Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,64 persen

b. Struktur Perekonomian

Struktur Lapangan usaha sebahagian bergeser dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan ekonomi masing-masing



lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Simalungun. Berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa lapangan usaha yang mendorong peningkatan PDRB:

Tabel. 1.5
Peran PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	19.718	21.859	24.915	28.406	33.338
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	90	94	99	107	112
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.551	4.932	5.294	5.480	5.863
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	28	28	30	31	31
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	34	35	37	38	41
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	4.041	4.253	4.602	4.776	4.824
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6.484	6.747	7.456	8.221	8.976
8	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	433	471	513	533	564
9	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	369	381	398	409	437
10	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	37	38	42	46	49
11	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.800	1.824	1.830	1.883	2.085
12	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	422	436	457	480	517
13	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	165	166	173	192	214
14	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional</i>	39.441	42.557	47.286	52.239	58.906

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025

1.3.2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun pada Tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang cukup positif dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya, jika pada tahun 2023 pertumbuhannya tercapat pada angka 4.68% maka pada tahun 2024 ekonomi tumbuh 5.07%



Tabel 1.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun
Tahun 2022-2023-2024

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth	%	3,7	4,68	5,07

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025

1.3.2.4. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional di Simalungun pada tahun 2024 sebesar 569.405 jiwa dengan tingkat partisipasinya sebesar 71,31%. Pada umumnya penduduk Simalungun bekerja di sektor Perdagangan dan Jasa sebesar 42,97%, kemudian disektor Pertanian yakni sebesar 38,46%, dan selanjutnya di sektor Industri sebesar 18,57%. Sedangkan menurut pendidikan, angkatan kerja di Simalungun 46,87% berpendidikan terbanyak sampai dengan tingkat SMA/SMK, sedangkan berpendidikan SMP 21,25% dan 10,60% berpendidikan Diploma sampai dengan Sarjana . Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Simalungun tahun 2024 sebanyak 322 orang, dengan rincian 180 laki-laki dan 142 perempuan. Jumlah ini menurun 72,10% dibanding tahun 2023

Jumlah PNS Tahun 2024 sebesar 7.133 terdiri dari 2.592 laki-laki dan 4.541 perempuan, dimana 80,89 persen merupakan lulusan perguruan tinggi. Berdasarkan golongan maka PNS di Pemerintahan Kabupaten Simalungun sebesar 66,90 persen menduduki golongan III dan 12,28 persen menduduki golongan IV sementara berdasarkan tempat bekerja



4.916 orang atau 68,92 persen di Dinas Pendidikan selanjutnya 296 orang di Dinas Pekerjaan Umum atau sekitar 4,15 persen. Menurut kecamatan, maka jumlah PNS terbanyak berada di lingkungan kantor Kecamatan Siantar sebanyak 52 orang, sedangkan jumlah PNS paling sedikit di Kecamatan Dolok Massagal berjumlah 9 orang

Kelembagaan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun terdiri dari Sekretariat Daerah 3 (Tiga) Asisten dan 12 (duabelas) bagian, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, Dinas 21 (duapuluh satu) Perangkat Daerah, Badan 5 (lima) Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu) Perangkat Daerah, 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, dan 3 (tiga) Rumah Sakit. Rincian Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah

1. Asisten Terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
2. Staf Ahli Terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum
3. Kepala Bagian Terdiri dari
 - a. Bagian Tata Pemerintahan
 - b. Bagian Kerjasama



- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- d. Bagian Hukum
- e. Bagian Pembangunan
- f. Bagian Perekonomian
- g. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Bagian Sumber Daya Alam
- i. Bagian Organisasi
- j. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- k. Bagian Umum

B. Sekretariat DPRD

C. Inspektorat Daerah

D. Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Dinas Pendidikan
- b. Dinas Perhubungan
- c. Dinas Perpustakaan dan Arsip
- d. Dinas Lingkungan Hidup
- e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Dinas Kebudayaan, pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori
- i. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- k. Dinas Sosial
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlingdunag Anak
- n. Dinas Pertanian
- o. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- p. Dinas Kesehatan



- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- r. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- s. Dinas Ketenagakerjaan
- t. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan
- u. Dinas Pemuda dan Olahraga
- v. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- aa. Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

E. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Parapat

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja dan Tatas Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, adalah sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada spek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasa/ikshtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diuraikan tentang :

a. Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yaitu :

- Membandingkan antara target dan hasil realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi Pembangunan Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi dan misi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan sampai 5 (lima) tahun terakhir dengan memaksimalkan seluruh potensi daerah yang dimiliki

Visi Pembangunan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 adalah : **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**

2.2. Misi Pembangunan Tahun 2021-2026

Kabupaten Simalungun telah menetapkan 10 (sepuluh) Misi Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Simalungun 2021-2026 yaitu:

1. Misi 1 : Pemulihan Ekonomi

Untuk mewujudkan misi 1 (satu) ini, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan beberapa program yaitu:

- Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- Pemberian dorongan dan fasilitasi pelaku perdagangan bibit, pupuk dan sarana produksi pertanian (saprota)
- Pembukaan peluang investasi seluas-luasnya, baik industri kecil dan menengah (IKM) khususnya yang terkait dengan pengolahan hasil-hasil pertanian maupun investasi di bidang pariwisata
- Memaksimalkan Administrasi KEK Sei Mangkei
- Pemanfaatan lahan seluas 200 Ha di Tapan Dolok sebagai Kawasan Industri Simalungun
- Optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagori



2. Misi 2 : Pemulihan Kesehatan

Untuk mewujudkan misi 2 (dua) ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa Program yaitu:

- Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara terus menerus
- Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara optimum
- Memaksimalkan RS Khusus Covid-19 batu Duapuluh dan 2 (dua) RSUD
- Rekrutmen dokter spesialis dasar dan penunjang
- Maksimalisasi Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu)
- Peningkatan penetrasi BPJS Kesehatan dan kartu Indonesia Sehat (KIS)

3. Misi 3 : Penerapan GCG (*Good and Clean Government*)

Untuk mewujudkan misi 3 (tiga), Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yaitu :

- Penerapan prinsip -prinsip GCG: Adil, mandiri, Akuntabel, Bertanggung Jawab dan Tranparan.
- Memaksimalkan peran Inspektorat Daerah
- Pemanfaatan teknologi informatika dalam pemerintahan

4. Misi 4 : Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam mewujudkan misi 4 (empat), Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yaitu :

- Internetisasi Sekolah (SD dan SMP)
- Penerapan konsep Merdeka Belajar, guru Penggerak dan Sekolah Penggerak.
- Penerapan Pendidikan budi pekerti (Akhlak Mulia) dengan memasukkan kearifan local yakni falsafah ***Habonaron do Bona*** dan motto ***Sapangambei Manoktok Hitei***
- Memaksimalkan penggunaan dana BOS
- Pelestarian dan pengembangan seni-budaya Simalungun dan etnis-etnis lain di Kabupaten Simalungun



5. Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Untuk mewujudkan misi 5 (lima), maka Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yaitu :

- Pengaitan diri secara aktif dengan BODT (Badan Otorita Danau Toba), agar Kabupaten Simalungun tidak hanya menjadi daerah perlintasan wisman (wisatawan mancanegara) dan wisnu (wisatawan nusantara)
- Penggairahan Kembali atraksi-atraksi budaya multi-etnis
- Pembinaan soal-soal *hospitality* (keramah-tamahan) kepada pelaku usaha pariwisata untuk meningkatkan lama singgah (*length of stay*) wisatawan
- Secara bertahap tapi cepat, meningkatkan kualitas infrastruktur ke destinasi-destinasi wisata

6. Misi 6 : Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis

Dalam Mewujudkan misi 6 (enam), Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yakni:

- Upaya pemulihan produksi padi yang sempat anjlok 121 ribu ton lebih dari tahun 2018 ke 2019
- Penanganan OPT (Organisme Perusak Tanaman) dan hama terutama hama tikus di sentra-sentra produksi beras
- Pengembangan sistem agribisnis, khususnya komoditas seperti jeruk, kopi dan hortikultura (sayur, bunga dan buah-buahan)

7. Misi 7 : Pembangunan Kualitas Infrastruktur

Dalam mewujudkan misi 7 (Tujuh), pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program seperti:

- Pengadaan tanpa fee proyek/program dan peningkatan pengawasan lapangan
- Maksimal LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik)
- Pemanfaatan dana CSR
- Pemanfaatan Dana Desa



8. Misi 8 : Peningkatan Kualitas Generasi Muda/Millennial

Dalam mewujudkan misi 8 (Delapan), ada beberapa program yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Simalungun diantaranya :

- Mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) dan membuka kembali Balai Latihan Kewirausahaan bagi generasi muda/millennial
- Menyediakan sarana kreatif di beberapa kota yang sedang berkembang seperti; Perdagangan, Sidamanik, Pematang Raya dan Saribudolok
- Mengaktifkan kembali Gedung Olah Raga (GOR) yang ada di Jl. Asahan, Pematang Siantar.

9. Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)

Dalam mewujudkan misi 9 (Sembilan), Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yaitu:

- Peningkatan Pendapatan (terutama Pendapatan Asli Daerah)
- Efisiensi Belanja

10. Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan misi 10 (sepuluh), Pemerintah Kabupaten Simalungun memiliki beberapa program yakni:

- Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja (Satker) dengan konsep “miskin struktur, kaya fungsi”
- Reformasi Birokrasi setelah melakukan pemetaan (*mapping*) Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan



Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Strategi serta arah kebijakan RPJMD 2021-2026 terhadap Visi dan Misi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam bentuk matriks berikut :

Tabel 2.1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Startegi

VISI/ MISI	Tujuan/Sasara	Indikator	Strategi
Visi : Rakyat Harus Sejahtera			
Misi 1 : Pemulihan Ekonomi			
Misi 5 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Misi 6 : Peningkatan Pertanian dan Pengembangan Sistem Agribisnis			
	Tujuan 1 : Meningkatkan daya Tarik pariwisata daerah dan ekonomi kreatif		
	Sasaran 1 : Meningkatkan daya Tarik pariwisata daerah ekonomi kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	
		LPE Kategori Industri pengolahan	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Percepatan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah
	Sasaran 3 : meningkatnya kondusivitas pengembangan iklim investasi daerah	Persentase peningkatan Investasi daerah	
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan			
	Sasaran 4: Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan
		Indeks Gini	
		Pendapatan Per Kapita	
	Sasaran 5 : Meningkatnya Peluang dan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka	
Misi 2: Pemulihan Kesehatan			
Misi 4 : Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			
Misi 8 : Peningkatan Kualitas Generasi Muda /Millenial			
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mandiri dan berdaya saing		



VISI/ MISI	Tujuan/Sasara	Indikator	Strategi
	Sasaran 6 : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia Indeks Kesehatan	Peningkatan kapasitas layanan Kesehatan
	Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan Kesetaraan gender	Indeks Pendidikan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Peningkatan mutu, akses dan layanan Pendidikan
	Sasaran 8 : Maningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Peningkatan prsetasi olahraga dan partisipasi dan kapasitas pemuda dalam pembangunan
Misi 3 : Penerapan GCG (Good and Clean Government)			
Misi 9 : Restrukturisasi Anggaran (Perbaikan Postur APBD)			
Misi 10 : Restrukturisasi Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kemandirian Daerah dan Implementasi Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 9 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Opini BPK Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimlisasi Teknologi Informasi dalam Implementasi Reformasi Birokrasi
	Sasaran 10 : Meningkatkan kualitas layanan dan Inovasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Indekes Inovasi Daerah (IGA)	
Misi 7 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur			
	Tujuan 5 : Meningkatkan pemerataan dan akses insfrastuktur pembangunan antar wilayah yang ramah lingkungan		
	Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Layana Infastruktur	Percepatan pembangunan insftastruktur dasar di seluruh desa



VISI/ MISI	Tujuan/Sasara	Indikator	Strategi
	Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	Mempertahankan keseimbangan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Simalungun yang merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja oleh seluruh OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun selama Tahun Anggaran 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 seperti terdapat pada tabel berikut:



Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,01
		Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata	1,5
		LPE Kategori Industri Pengolahan	1,5
2.	Meningkatnya Kapasitas Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,28
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4,2
4.	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,73
		Indeks Gini	0,275
		Pendapatan Perkapita	51,8
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,19
6.	Meningkatnya Derajat dan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Prima	Indeks Kesehatan	79,78
7.	Meningkatnya Pemerataan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan yang Berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	69,48
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,07
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	55
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,18
9.	Meningkatnya Kapasitas Kemandirian Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (59,17)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	CC (55,00)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	67,5
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	66
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	25,23
11.	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Antar Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	22,30
12.	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Infrastruktur dasar Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	77
13.	Meningkatnya Ketangguhan Daerah dan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	73,00



Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.67
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.00
		LPE Kategori Industri Pengolahan	2.5
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.68
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4.8
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.49
		Indeks Gini	0.270
		Pendapatan Perkapita	53.90
5.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.19
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.18
		Indeks Kesehatan	80.11
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.17
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.08
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	60.00
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	61.67 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	60.00 (B)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	70.00
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	67.00
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	30.10
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	22.47
12.	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	72.50



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu media untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi. Sebagai salah satu bentuk transparansi, pengukuran kinerja dilakukan dengan realisasi masing-masing kinerja unit organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Simalungun terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja



Secara umum tujuan perjanjian kinerja Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024, antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan tugas yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya.
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
4. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur di lingkungan Kabupaten Simalungun.
5. Sebagai dasar dalam pengukuran sasaran kinerja, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.
6. Menilai adanya keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, sekaligus sebagai dasar.

Untuk pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan skala ordinal dengan 5 (lima) kategori, yaitu : Sangat Baik ; Baik ; Cukup ; Kurang; dan, Sangat Kurang, dengan rincian sebagai berikut :

3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target Kinerja adalah tingkat hasil yang spesifik dan terencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu eksplisit dengan tingkat sumber daya tertentu. Tanpa ada target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Pengukuran capaian target kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja dengan indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2024.

Berikut adalah tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Bupati Simalungun , berhasil tidaknya pencapaian Bupati Simalungun untuk Tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut:



Tabel 3.1
Tabel Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,01	2,34	3,01	3,67	4,34	4,48	4,48
2	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	NA	1	1,5	2	2,5	2,8	2,8
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	-2,85	0,5	1,5	2,5	3,5	2,4	2,4
4	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,01	3,52	4,28	4,68	4,88	5,2	5,2
5	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	NA	3,2	4,2	4,8	5,4	5,8	5,8
6	Tingkat Kemiskinan	8,46	7,97	7,73	7,49	7,24	7	7
7	Indeks Gini	0,295	0,280	0,275	0,270	0,265	0,260	0,260
8	Pendapatan per Kapita	45,25	49,69	51,8	53,9	56,01	58,11	58,11
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,58	4,39	4,29	4,19	4,1	4	4
10	Indeks Pembangunan Manusia	73,25	74,26	74,72	75,18	75,64	76,09	76,09
11	Indeks Kesehatan	78,8	79,46	79,78	80,11	80,44	80,76	80,76
12	Indeks Pendidikan	67,5	68,79	69,48	70,17	70,87	71,56	71,56
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,02	93,05	93,07	93,08	93,1	93,15	93,15
14	Indeks Pembangunan Pemuda	50	52,5	55	60	62,5	67	67
15	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	CC (-56,67)	CC (-59,17)	B (-61,67)	B (-64,17)	B (66,67)	B (66,67)
16	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	C (40,07)	C (45)	CC (55,00)	B (60)	B (64)	B (70,00)	B (70,00)
17	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	65	67,5	70	72,5	75	75
19	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	65	66	67	68,5	70	70
20	Indeks Inovasi Daerah (IGA)	0,08	20,22	25,23	30,10	30,5	30,90	30,90
21	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	21,47	22,18	22,30	22,40	22,87	22,94	22,94
22	Indeks Resiko Bencana	73,59	73,50	73,00	72,50	72,00	71,50	71,50

Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja Utama Bupati Simalungun yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026.



TABEL 3.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN SIMALUNGUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.67
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.00
		LPE Kategori Industri Pengolahan	2.5
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.68
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4.8
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.49
		Indeks Gini	0.270
		Pendapatan Perkapita	53.90
5.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.19
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.18
		Indeks Kesehatan	80.11
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.17
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.08
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Jumlah Prestasi Olahraga	16
		Indeks Pembangunan Pemuda	60.00
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	61.67 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	60.00 (B)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	70.00
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	67.00
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	30.10
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	22.47
		Persentase Kondisi mantap Jalan Kabupaten	55
12.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Luas Jaringan Daerah Irigasi Permukiman Kewenangan Daerah yang di rehabilitasi	45
13.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar PERumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman layak huni	78
14.	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks kulitas lingkungan hidup	88.10
		Indeks Resiko Bencana	72.50
15.	Terwujudnya Masyarakat Tangguh bencana	Rasio Nagori/Kelurahan Tanggung Bencana	25



Tabel 3.3
Tabel Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.67
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.00
		LPE Kategori Industri Pengolahan	2.5
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.68
3.	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4.8
4.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.49
		Indeks Gini	0.270
		Pendapatan Perkapita	53.90
5.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.19
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.18
		Indeks Kesehatan	80.11
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.17
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.08
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	60.00
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	61.67 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	60.00 (B)
		Opini BPK	WTP
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	70.00
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	67.00
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	30.10
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	22.47
12.	Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	72.50



3.1.1. Klasifikasi Penilaian Capaian

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan.

Tabel 3.4
Interpretasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governnance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan



No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
			sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

3.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun Tahun 2024

Tabel 3.5
Capaian atas indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.67	4.89	133%	Sangat Memuaskan	BPS
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2.00	0.78	39%	Kurang	BPS
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2.5	1.82	0,728	Sangat Baik	BPS
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan	%	4.68	5.26	112%	Sangat Memuaskan	BPS & BAPPERIDA



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi	Sumber Data
		Perikanan						
3.	Meningkatnya Konduktivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	4.8	14.54 %	302%	Sangat Memuaskan	DPMPTS P Kab. Simalungun
4.	Menigkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	7.49	7.72	97%	-	BPS
		Indeks Gini	Indeks	0.270	0.2950 (2023)	91%	Sangat Memuaskan	BPS
		Pendapatan Perkapita	Juta Rp	53.90	58.90	109%	Sangat Memuaskan	BPS
5.	Menigkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.19	6.12	65%	Cukup	BPS
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.18	75.88	100.9 %	Sangat memuaskan	BPS (IPM KAB. Simalungun 2024)
		Indeks Kesehatan	Indeks	80.11	79.85	99%	Sangat memuaskan	Dinkes Kab. Simalungun
7.	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	Indeks	70.17	93.00 (2023)	132%	Sangat memuaskan	Dinas Pendidikan Kab. Simalungun
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.08	93.09 (2023)	100%	Sangat memuaskan	BPS
8.	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60.00	49.55	82%	Memuaskan	Dispora Kab. Simalungun
9.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Refromasi Birokrasi	Indkes	61.67 (B)	62.47 (B)	101%	Sangat Memuaskan	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi kabupaten Simalungun Tahun 2024
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	60.00 (B)	52.02 (cc)	86%	Memuaskan	esr.menpan.go.id
		Opini BPK	Indeks	WTP	WTP (2023)	100%	Sangat Memuaskan	BPK RI
		Indeks Pengelolaan Keuangan Dearah	Indeks	70.00	70.512	94%	Sangat Memuaskan	Ipkd-bpp.kemndagri.go.id
10.	Meningkatnya Kualitas Layanan dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67.00	85.17	127%	Sangat Memuaskan	SKM Pemkab. Simalungun Tahun



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi	Sumber Data
	Inovasi Daerah							2024
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Indkes	30.10	41.49 (Inovativ)	137%	Sangat Memuaskan	https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/login dan Surat Keputusan Kemendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024
11.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	22.47	-	-	-	Dinas PUTR Kab. Simalungun
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Indeks	72.50	89.07	81%	Memuaskan	BNPB

3.1.3. Analisis Capaian Kinerja Kabupaten Simalungun

Tahun 2024

3.1.3.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif

Tabel 3.6
Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi	Sumber Data
1	2	3		4				
1	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.67	4.89	133%	Sangat Memuaskan	BPS
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2.00	0.78	39%	Kurang	BPS
		LPE Kategori Industri Pengolahan	%	2.5	1.82	0,728	Sangat Baik	BPS



a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan Pengembangan Program Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk beberapa tahun kedepan, seperti yang tertuang dalam RPJMD. Adapun Tujuan dan Sasaran tersebut dicapai dengan Program dan Kegiatan sebagaimana dijelaskan dengan Sasaran Meningkatnya daya Tarik pariwisata daerah ekonomi kreatif dengan indikator yang pertama adalah laju pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2024 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Simalungun berada pada angka 4,89 terhadap target tahun 2024 yakni 3.67, dengan demikian capaian dari LPE ini adalah sebesar 133%. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara bahwa Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.



Tabel 3.7
Realisasi LPE Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2024
(1)	(4)
KAB NIAS	3,89
KAB MANDAILING NATAL	4,83
KAB TAPANULI SELATAN	5,12
KAB TAPANULI TENGAH	4,15
KAB TAPANULI UTARA	4,77
KAB TOBA	4,84
KAB LABUHAN BATU	5,06
KAB ASAHAN	4,68
KAB SIMALUNGUN	4,89
KAB DAIRI	4,97
KAB KARO	4,22
KAB DELI SERDANG	5,36
KAB LANGKAT	4,98
KAB NIAS SELATAN	3,82
KAB HUMBANG HASUNDUTAN	4,79
KAB PAKPAK BHARAT	5,02
KAB SAMOSIR	5,02
KAB SERDANG BEDAGAI	5,01
KAB BATU BARA	4,12
KAB PADANG LAWAS UTARA	4,99
KAB PADANG LAWAS	5,02
KAB LABUHAN BATU SELATAN	4,89
KAB LABUHAN BATU UTARA	4,24
KAB NIAS UTARA	3,64
KAB NIAS BARAT	3,89
KOTA SIBOLGA	3,92
KOTA TANJUNG BALAI	4,91
KOTA PEMATANG SIANTAR	4,61
KOTA TEBING TINGGI	3,37
KOTA MEDAN	5,07
KOTA BINJAI	4,66
KOTA PADANG SIDEMPUAN	5,01
KOTA GUNUNG SITOLI	3,84
SUMATERA UTARA	5,03

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025



2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Tabel 3.8
Penyediaan Akomodasi dan Makan/Minum
di Sektor Pariwisata

Lapangan Usaha/ Industry		2024
	(1)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	56,60
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,19
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,07
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	15,24
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,78
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,96

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

Kontribusi pariwisata terhadap PDRB hanya pendapatan melalui retribusi masuk tempat wisata sedangkan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tidak melalui dinas pariwisata. Sedangkan makan minum, akomodasi dan lainnya diterima melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. Tahun 2024 untuk penghitungan PDRB berdasarkan Simalungun Dalam Angka 2025 realisasi dari Kontribusi PDRB terhadap sektor pariwisata adalah sebesar 0,77 % dengan target pada indikator “Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB” adalah 2.00%



Tabel 3.9
Tingkat Hunian Hotel di Kawasan Pariwisata Kabupaten
Simalungun Tahun 2024

No	Kategori Hunian	Nama Hunian	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar Terjual	Jumlah Kamar Tersedia
1	2	3	4	5	6 = 4 x 365 Hari
1.	Hotel	Niagara Hotel	175	31.047	63.875
2.	Hotel	Khas parapat	102	22.419	37.230
3.	Hotel	Atsari Hotel	43	19.291	15.695
4.	Hotel	Grand Tamaro	76	7.640	27.740
5.	Hotel	Danau Toba Cottage	102	13.952	37.230
6.	Hotel	Hermina	62	3.051	22.630
7.	Hotel	Darma Agung	50	4.386	18.250
8.	Hotel	Patra Jasa	47	3.848	17.155
9.	Hotel	Pelangi	50	1.785	18.250
10.	Hotel	Siantar	42	3.560	15.330
11.	Hotel	Sedayu I	29	1.281	10.585
12.	Hotel	Sedayu II	15	1.123	5.475
13.	Melati	Sangam Aek Sere	39	1.356	14.235
14.	Penginapan	Budi Mulya	28	282	10.220
15.	Penginapan	Kenangan	17	213	6.205
16.	Wisma	Wisata Bahari	80	799	29.200
17.	Hotel	Pandu	30	2.692	10.950
18.	Penginapan	Penginapan Sigumba-Gumba	15	641	5.475
19.	Hotel	Hotel Agape	31	647	11.315
20.	Penginapan	Tanjung Harapan	5	426	1.825
21.	Penginapan	Horisan	15	2.765	5.475
22.	Homestay	Kampung Warna Warni	10	549	3.650
23.	Penginapan	Garden Tea	14	976	5.110
24.	Hotel	Sapadia	35	365	12.775
25.	Hotel	Grean Park Hotel	70	1.434	25.550

No	Kategori Hunian	Nama Hunian	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar Terjual	Jumlah Kamar Tersedia
26.	Penginapan	Penginapan Pantai Paris	10	584	3.650
27.	Hotel	My Nashya	32	1.158	11.680
JUMLAH			1.224	128.270	446.760

Tahun 2024 sektor pariwisata mengalami Peningkatan hal ini di tandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan lokal yang melakukan kunjungan ke daerah wisata yang ada di Kabupaten Simalungun, tercatat sampai dengan akhir desember tahun 2024 total kunjungan wisatawan lokal mencapai 2.842.157 orang tetapi sebaliknya untuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan yakni 16.641 orang



Gambar: Kawasan Wisata Harangan Girsang Kec. Girsang Sipangan Bolon

**Tabel 3.10
Lokasi wisata dan jumlah kunjungan wisatawan di
Kabupaten Simalungun**

NO	OBJEK WISATA	2024	
		WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA
1	Parapat	971.327	11.244
2	Karang Anyer	119.291	6
3	Rumah Bolon	1.199	508



NO	OBJEK WISATA	2024	
		WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGERA
4	Haranggaol	19.441	8
5	Pemandian Alam Sejuk (PAS)	290.536	-
6	Bukit Indah Simarjarunjung (BIS)	136.383	-
7	Carabel Simarjarunjung	17.354	-
8	Bah Damanik (Sarimatondang)	69.449	6.630
9	Pemandian Simatahuting (Kec. Sidamanik)	50.307	156
10	Pulo Dong Dong Sidamanik	15.755	-
11	Air Terjun Bah Biak	15.395	8
12	Bukit Indah Sipolha (BIS) Kec. Pamatang Sidamanik	12.407	14
13	Pemandian Aek Batu Sipolha Kec. Pamatang Sidamanik	42.236	2
14	Ikan Mas Sipolha Kec. Pamatang Sidamanik	31.405	27
15	Pantai Paris, Grace, Ardana, Bt.Hoda, Laura, Aropan, Elexia dll (Tigaras)	553.693	-
16	Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC)	64.557	27
17	TWA Dolok Tinggi Raja	2.089	-
18	Wisata Agro Tigaraja Farm - Kec. Pamatang Silimakuta	27.341	930
19	Pemandian Deviva Indah - Kec. Dolok Batu Nanggar	30.626	-
20	Keramat Kubah - Kec. Bandar	6.677	58
21	Pemandian Bah Uluni Mariah Bandar – Kec. Pamatang Bandar		
22	Pemandian Silulu – Kec. Gunung Malela	78.155	23
23	Labersa Simalungun Fantasy	91.259	-
24	Pemandian Sweembath	190.556	-
25	Buttu Asri	7.719	-
	JUMLAH	2.842.157	16.641

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Simalungun, 2025



Pemrintah Kabupaten Simalungun juga melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten Simalungun salah satunya adalah dengan selalu mempromosikan wisata Simalungun lewat sloga “Simalungun Tourism”

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Simalungun selain dengan melakukan promosi lewat slogan “Simalungun Tourism”, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga melakukan pemasaran wista untuk meningkatkan wisata local dan mancanegara lewat beberapa event pariwisata di Kawasan Danau Toba di Kecamatan Girssang Sipangan Bolon seperti :

- Esport Fest PUBG Mobile
- Lebaran di Simalungun
- Pelaksanaan kegiatan side event *Aqua Bike Jetski World Championship* seperti : Road to Aquabike, Anugerah Pariwisata Simalungun 2024, Simalungun Kriya Fest 2024



Gambar: Penyerahan Hadian Event Aquabike Jetski World Championship 2024



Gambar: Malam Puncka E-Sport PUBG Mobile



Gambar: Pelaksanaan Event PUBG Mobile di Kawasan parapet Danau Toba Kec. Girsang Sipangan Bolon Tahun 2024



3. LPE kategori Industri Pengolahan

Tabel 3.11
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Simalungun

No	Lapangan Usaha/Industry	2024
1	2	7
1	Industri Pengolahan/ Manufacturing	1,82

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Industri Pengolahan Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2024 mencapai angka 1,82, data tersebut merupakan data dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Simalungun 2024. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.



b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif dengan beberapa tahun terakhir

- **Indikator LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif dengan Beberapa tahun terakhir

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
KAB SIMALUNGUN	4,68	5,07	4.89
SUMATERA UTARA	4,73	5,01	5,03

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025

Berdasarkan Buku Simalungun Dalam Angka 2025, Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun untuk tahun 2024 berada dibawah tahun 2023, jika pada tahun 2023 LPE adalah sebesar 5.07 maka pada tahun 2024 juga berada angka 4.89.

- **Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Meningkatnya daya Tarik pariwisata dan ekpnomi kreatif

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	49,99	51,34	52,69	54,38	56,60
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,23	0,22	0,21	0,20	0,19
C Industri Pengolahan/Manufacturing	11,54	11,58	11,20	10,49	9,95



	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,07	0,07	0,06	0,06	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,25	9,99	9,73	9,14	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,+	15,85	15,77	15,74	15,24
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,68	1,63	1,63	1,72	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,86	0,79	0,76	0,77	0,78
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,56	0,56	0,54	0,53	0,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,1	1,11	1,09	1,02	0,96

Sumber : BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

Pada tampilan tabel diatas, tren angka yang di tunjukkan pada tabel dari tahun 2020-2021 untuk Penyediaan akomodasi dan makan minum yang juga merupakan bagian dari indikator “Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB” cenderung meningkat setiap tahunnya.

Semakin membaiknya iklim pariwisata dan kepercayaan wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung ke Kabupaten Simalungun terus memberikan dampak yang positif bagi perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun. Selain itu penyedia tempat wisata juga semakin memberikan pelayanan yang baik dan juga menjamin keamanan dan kenyamanan di tempat wisata.

**Tabel 3.14****Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 dan 2024**

NO	OBJEK WISATA	2023		2024	
		WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA
1	Parapat	1.188.851	15.084	971.327	11.244
2	Karang Anyer	45.675	-	119.291	6
3	Rumah Bolon	1.753	167	1.199	508
4	Haranggaol	28.289	42	19.441	8
5	Permandian Alam Sejuk (PAS)	147.508	-	290.536	-
6	Bukit Indah Simarjarunjung (BIS)	230.596	10.809	136.383	-
7	Carabbel Simarjarunjung	-	-	17.354	-
8	Bah Damanik (Sarimatondang)	192.580	1.109	69.449	6.630
9	Pemandian Simatahuting (Kec. Sidamanik)	29.392	-	50.307	156
10	Pulo Dong Dong Sidamanik	-	-	15.755	-
11	Air Terjun Bah Biak	13.893	-	15.395	8
12	Bukit Indah Sipolha (BIS) Kec. Pamatang Sidamanik	16.078	7	12.407	14
13	Pemandian Aek Batu Sipolha Kec. Pamatang Sidamanik	22.670	-	42.236	2
14	Ikan Mas Sipolha Kec. Pamatang Sidamanik	-	-	31.405	27
15	Pantai Paris, Grace, Ardana, Bt.Hoda, Laura, Aropan, Elexia dll (Tigaras)	468.773	-	553.693	-
16	Aek Nauli Elephant Conservation Camp (ANECC)	39.711	83	64.557	27
17	TWA Dolok Tinggi Raja	1.075	-	2.089	-
18	Wisata Agro Tigaraja Farm - Kec. Pamatang Silimakuta	5.748	-	27.341	930
19	Pemandian Deviva Indah - Kec. Dolok Batu Nanggar	58.180	-	30.626	-
20	Keramat Kubah - Kec. Bandar	3.231	-	6.677	58
21	Pemandian Bah Uluni Mariah Bandar - Kec.	-	-		



NO	OBJEK WISATA	2023		2024	
		WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA	WISATAWAN NUSANTARA	WISATAWAN MANCANEGARA
	Pamatang Bandar				
22	Pemandian Silulu – Kec. Gunung Malela	36.569	-	78.155	23
23	Labersa Simalungun Fantasy	-	-	91.259	-
24	Pemandian Sweembath	-	-	190.556	-
25	Buttu Asri	-	-	7.719	-
	JUMLAH	2.530.572	27.259	2.842.157	16.641

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Simalungun, 2025

Pemerintah Kabupaten Simalungun Terus mengembangkan Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Simalungun guna untuk meningkatkan sektor pariwisata yang pada akhirnya akan berdampak pada munculnya pelaku pelaku usaha dan juga UKM yang akan menyerap dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan juga sebagai pendorong perekonomian Masyarakat di Kabupaten Simalungun



Gambar: Pengembangan Eko Wisata Harangan Gorsang di Girsang Sipangan Bolon



- **Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan**

Tabel 3.15
Industri Pengolahan di Kabupaten Simalungun

No	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Industri Pengolahan/ Manufacturing	- 2,85	2,00	2,01	3,07	1.82

Sumber: BPS, Simalungun Dalam Angka, 2025

Pada Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan untuk tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika pada tahun 2023 LPE Kategori Industri Pengolahan berada pada angka 3.07 maka pada tahun 2024 berada pada angka 1.82.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026.

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah dan ekonomi Kreatif sampai dengan tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4.89	4,48	109%
	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.78	2,8	27%
	LPE Kategori Industri Pengolahan	1.82	2,4	75%



- **Indikator LPE Laju Pertumbuhan Ekonomi**

LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Simalungun pada akhir RPJMD 2026 di targetkan mencapai angka 4,48, sedangkan pada tahun 2024 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun berada pada angka 4.89 dengan capaian 109%. Realisasi Tahun 2024 sudah melebihi target dari pada RPJMD, walaupun demikian pemerintah Kabupaten Simalungun tetap menjaga kesetabilan ekonomi dengan berbagai macam upaya yang telah dilakukan melaku stakeholder dan juga dinas terkait.

- **Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun 2024 berada pada angka 0,78%, realisasi ini jauh berada dibawah target RPJMD yakni 2,8% dengan capaian sebesar 27% terhadap target RPJMD tersebut. Pemerintah Kabupaten Simalugun melalui DISBUDPAREKRAF terus berupaya meningkatkan promosi wisata di Kawasan simalungun dengan berbagai macam ivent yang bekerjasama dengan penyelenggara dan pemilik tempat wisata dan juga perhotelan yang ada di Kawasan Kabupaten Simalungun.

- **Indikator LPE Kategori Industri Pengolahan**

Pada tahun 2024 realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kategori Industri Pengolahan berada pada angka 1.82%, realisasi ini masih berada di bawah target RPJMD 2026 yakni sebesar 2,4. Dengan demikian hasil realsiasi terhadap capaian LPE Kategori Industri Pengolahan adalah sebesar 75%.



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untuk pencapaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.17
Analisis Keberhasilan / kegagalan Realisasi Kinerja Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata daerah dan Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3.67	5.07	138%	Keberhasilan pada indikator ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung dan mendorong pelaku usaha untuk terus berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Simalungun, selain itu tingkat inflasi yang rendah juga menjadi salah satu faktor LPE di Kabupaten Simalungun berjalan dengan baik	-
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.00	0.78	39%	Ketidak tercapainya pada indikator ini disebabkan sedikit menurunnya angka wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Kabupaten Simalungun	Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DISBUDPARE KRAF bekerja sama dengan pengelola pariwisata dan juga perhotelan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
							melakukan berbagai macam upaya dan invent untuk selalu menarik wisatawan khususnya yang barada di Kawasan Kabupaten Simallungun
		LPE Kategori Industri Pengolahan	2.5	1.82	0,728	Menurunnya persentase LPE Katogeri Industri Pengolahan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya adalah menurunnya produksi pengolahan dan juga berkurangnya SDM yang bergerak di bidang pengolahan	Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Ketenaga Kerjaan, Juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM untuk menggalakkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada UKM maasyarakat agar selalu terus membangkitkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

3.1.3.2. Sasaran 2, Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Indikator: Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan Tahun 2024

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumbe Data
			Satuan	Targe t	Realisa si			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4.68	5.26	112%	Sangat Memuaskan	BPS & BAPPERIDA

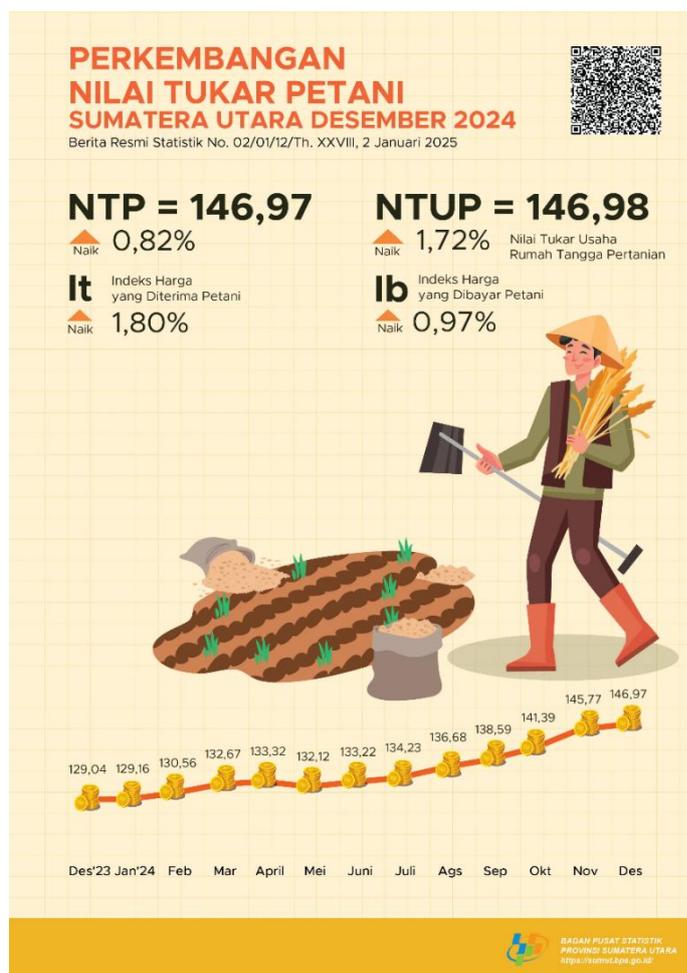


NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Pada table beikut akan ditampilkan Nilai Tukar Petani secara menyeluruh dan rata-ratanya.

Untuk NTP Kabupaten Simalungun Tahun 2024 masih mengikuti NTP Provinsi Sumatera Utara dalam Kondisi Bulan Desember Tahun 2024 yakni sebesar 146,97. Selanjutnya untuk mendapatkan NTP dengan angka 5,26 untuk Kabupaten Simalungun adalah dengan:

Realisasi NTP 2024	$NTP\ 2024 \times Realisasi\ 2023) : NTP\ 2023$
Realisasi NTP 2024	659,3532 : 125,33 = 5,26

Sumber: BAPPERIDA Kab. Simalungun



Sumber: BPS Sumatera Utara 2025



Meningkatnya NTP ini tidak terlepas dari koordiansi lintas sectoral diantaranya dengan telah dibangunnya jalan/akses menuju ke daerah pertanian yang semakin baik, hal ini juga di tandai dengan meningkatnya akses jalan yang baik. Jalan tersebut juga dibangun menggunakan anggaran dana desa dan juga anggaran yang bersumber dari APBD melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu juga dengan semakin membaiknya jaringan irigasi yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PUPR juga meningkatkan hasil pertanian sawah yang hamper tersebar di seluruh Kawasan Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.19
Rata-rata produksi pertanian Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

No	Jenis Produksi Pertanian dan Peternakan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rerata produktivitas padi sawah (Kw/Ha)	52,69	58,23	110,51
2	Rerata produktivitas padi ladang (Kw/Ha)	32,87	41,91	127,50
3	Rerata produktivitas jagung (Kw/Ha)	52,97	58,33	110,11
4	Rerata produktivitas ubi kayu (Kw/Ha)	300,18	331,04	110,28
5	Rerata produktivitas bawang merah (Ton/Ha)	10,72	16,75	156,25
6	Rerata produktivitas cabai (Ton/Ha)	9,60	19,57	203,85
7	Rerata produktivitas jeruk (Ton/Ha)	26,57	35,20	132,48
8	Rerata produktivitas Sawit (TBS) (Kg/Ha)	20.029,12	12.611,27	62,96
9	Rerata produktivitas Karet (Kg/Ha)	880,61	1.093,41	80,53
10	Rerata produktivitas Kopi (Kg/Ha)	510,88	500,52	97,97
11	Persentase peningkatan kejadian penyakit hewan menular	38,13	90,7	237,87

Sumber: Dinas Pertanian 2025

Pemerintah Kabupaten Simalugun melalui Dinas pertanian telah melakukan beberapa program untuk meningkatkan hasil produktifitas pertanian di Kabupaten



Simalungun, berikut adalah beberapa hasil produksi pertanian di Kabupaten Simalungun.

Salah satu tanaman pangan yang dominan diusahakan oleh masyarakat adalah tanaman padi yang terdiri dari padi sawah dan ladang. Kabupaten Simalungun dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Sumatera Utara. Target produktivitas padi sawah tahun 2024 adalah 52,69 Kw/Ha dan realisasi tahun 2024 sebesar 58,23 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 110,51 %. Produktivitas padi sawah pada Tahun 2024 terealisasi didukung dengan pemupukan berimbang, penyediaan benih bermutu, cukupnya alat dan mesin pertanian dalam pengolahan lahan dan adanya pergerakan percepatan tanam dari benih bantuan pemerintah. Untuk peningkatan produksi/produktivitas dan Indeks Pertanaman pada Tahun 2024 dilakukan Launching Gerakan Tanam Perdana melalui UPSUS (Upaya penanganan Khusus). Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk sasaran strategis 1 capaiannya telah melebihi target yang direncanakan



Foto Kegiatan Pelaksanaan Panen Raya Padi Perdana Dalam Rangka Mewujudkan Perluasan Areal Tanam (PAT)



Foto Kegiatan Pelaksanaan Launching Gerakan Tanam dalam Rangka Mewujudkan Program Pemerintah Pusat melalui UPSUS (Upaya Penanganan Khusus) secara Nasional

Selain padi sawah padi ladang juga merupakan bagian penting dari produksi pertanian yang ada di Kawasan dataran tinggi kabupaten simalungun. Pada tahun 2024 Target produktivitas padi ladang tahun 2024 adalah 32,87 Kw/Ha dan realisasi tahun 2024 sebesar 41,91 Kw/Ha dimana persentasenya sebesar 127,50 %. Produktivitas padi ladang pada Tahun 2024 terealisasi didukung dengan pemupukan berimbang, penyediaan benih bermutu, cukupnya alat dan mesin pertanian dalam pengolahan lahan dan adanya pergerakan percepatan tanam dari benih bantuan pemerintah. Untuk peningkatan produksi/produktivitas dan Indeks Pertanaman pada Tahun 2024 dilakukan Launching Gerakan Tanam Perdana dan Gerakan Perluasan Areal Tanam Padi Gogo melalui Tumpang Sisip dengan Kelapa Sawit.



Foto Kegiatan Pelaksanaan Launching Gerakan Tanam Perluasan Areal Tanam Padi Gogo Bersama Kodim

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.20
Realisasi Kinerja Meningkatnya kesejahteraan Petani dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	4.02	4.84	4.68	5.26	112%

Realisasi Nilai Tukar Petani dari tahun 2022-2024 cenderung meningkat, jika pada tahun 2022 NTP berada pada angka 4.02 selanjutnya tahun 2023 adalah sebesar 4.84 dan tahun 2024 adalah sebesar 5.26. Meningkatnya NTP ini tidak terlepas dari membaiknya sektor pertanian dan juga tingkat pendapatan riil petani.



Tabel 3.21
Rata-Rata Pendapatan Bersih Sebulan Pekerja
Informal Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan
sektor Pertanian

NO	Kabupaten/Kota Regency/Manucipality	Pertanian/Agriculture	
		2023	2024
1	2	3	4
01	Nias	630.957	829.954
02	Mandailing Natal	1.124.237	1.276.494
03	Tapanuli Selatan	1.338.391	1.276.650
04	Tapanuli Tengah	996.325	1.160.844
05	Tapanuli Utara	1.184.652	1.087.148
06	Toba	1.330.950	1.184.740
07	Labuhanbatu	2.118.120	1.758.340
08	Asahan	2.035.367	1.863.070
09	Simalungun	1.430.313	1.556.424
10	Dairi	1.227.634	1.720.891
11	Karo	2.092.783	1.870.217
12	Deli Serdang	1.921.765	2.356.941
13	Langkat	1.645.444	1.791.980
14	Nias Selatan	892.127	1.088.568
15	Humbang Hasundutan	1.072.677	1.326.896
16	Pakpak Bharat	937.707	816.355
17	Samosir	988.782	908.512
18	Serdang Bedagai	1.731.026	1.650.320
19	Batu Bara	1.830.152	1.613.481
20	Padang Lawas Utara	1.916.757	1.814.617
21	Padang Lawas	1.982.715	2.277.291
22	Labuhanbatu Selatan	2.237.226	2.062.356
23	Labuhanbatu Utara	1.932.589	1.892.212
24	Nias Utara	550.506	613.923
25	Nias Barat	633.743	699.130
26	Sibolga	1.502.344	1.849.413
27	Tanjungbalai	1.261.359	1.999.261
28	Pematangsiantar	1.048.839	2.053.937
29	Tebing Tinggi	2.498.849	2.013.210
30	Medan	2.136.617	3.523.285
31	Binjai	1.674.245	2.042.501
32	Padang Sidempuan	1.567.680	1.351.018
33	Gunungsitoli	966.719	1.150.808
	Sumatera Utara	1.601.156	1.644.241

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Kesejahteraan Petani Tahun 2024 dengan Target akhir RPJMD 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.26	5.2	100%

Pemerintah Kabupaten Simalungun pada akhir RPJMD menetapkan target sebesar 5.2 pada indikator Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, untuk tahun 2024 realisasi dari Indikator NTP Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah 5.26 dengan tingkat kemajuan tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 100%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan realisasi Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.26	122.78 (Nasional)	-
			146,97(Sumatera Utara)	-



Kondisi NTP Kabupaten Simalungun Tahun 2024 masih menggunakan dan mengikuti data dari NTP Provinsi Sumatera Utara yakni 146.97. sehingga NTP Kabupaten Simalungun tidak bisa dibandingkan dengan realisasi NTP dari Provinsi Sumatera Utara. Tetapi Jika NTP Sumatera Utara dibandingkan dengan NTP nasional maka capaiannya adalah sebesar 119,97%, angka ini diperoleh dengan membandingkan antara NTP Sumatera Utara dengan NTP Nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.34

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kesejahteraan Petani sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	sokusi
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.68	5.26	112%	Tercapainya target tidak terlepas dari kerja keras seluruh stakeholder yang memiliki peran penting dalam meningkatnya nilai NTP. Selain itu harga yang diterima petani lebih besar dari pada nilai jual. Selain itu Pemerintah Kab, Simalungun melalui Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan dan peternakan juga selalu melakukan monitoring kepada petani dan memberikan bantuan kepada petani dan masyarakat sebagai bagian menjaga keseimbangan kebutuhan akan bibit dan harga hasil pertanian	-



3.1.3.3. Sasaran 3, Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah.

Tabel 3.35
Mengingkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah

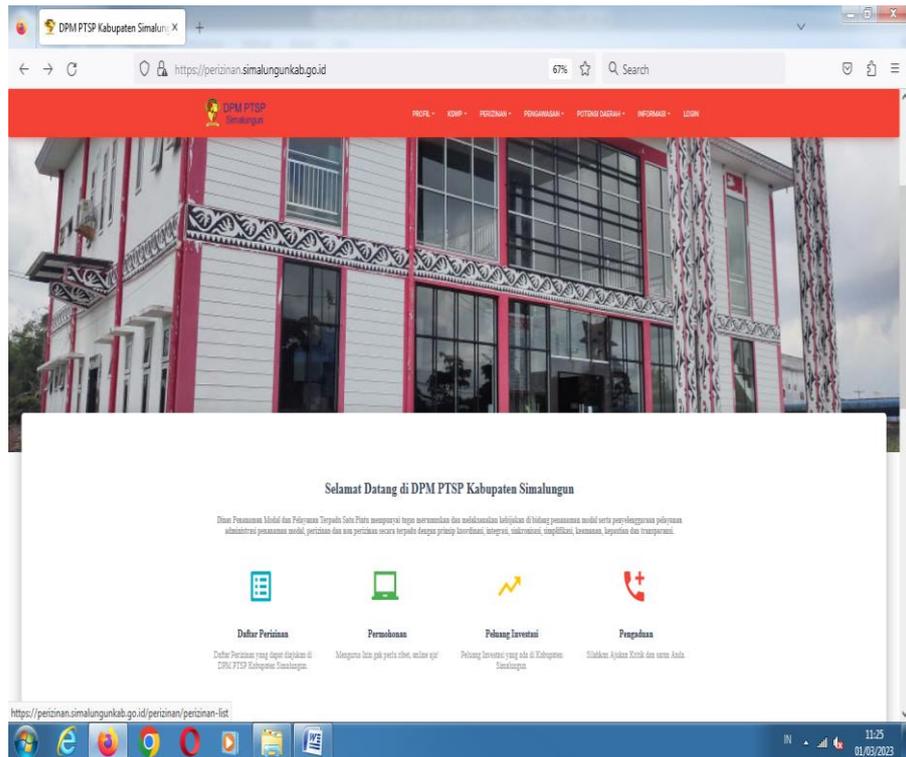
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	4.8	14.54	302%	Sangat Memuaskan	DPMPTSP Kab. Simalungun

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Mengingkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah dengan Tahun 2024

4. Indikator: Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Kemudahan akses perizinan yang ada di Kab. Simalungun sangat berperan besar terhadap peningkatan iklim investasi di Kawasan Kab. Simalungun, salah satu kemudahan tersebut adalah dengan menerapkan sistem OSS.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) pada 9 Juli 2018 untuk mempermudah proses perizinan usaha di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun selalu menerapkan dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini kepada masyarakat, disisi lain proses perizinan yang sebelumnya memakan waktu dan birokratis kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu pula masyarakat dapat mengakses proses perizinan melalui website <https://perizinan.simalungunkab.go.id>.



Gambar : Website DPMPTS Kab. Simalungun
 Sumber: DPMPTS Kab. Simalungun

Pada tahun 2024 nilai investasi yang dicapai oleh Kabupaten Simalungun adalah sebesar Rp. 9.617.913.353.680,00, nilai ini lebih tinggi dari capai nilai investasi pada tahun 2023 yakni sebesar 8.219.605.040.000,00. Peningkatan investasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

**DAFTAR REALISASI INVESTASI LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TAHUN 2023 - 2024 KABUPATEN SIMALUNGUN**

Tahun	REALISASI INVESTASI PMA/PMDN				JUMLAH	Rumus / Persamaan	Capaian Kinerja
	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2023	3.935.623.142.985,00	782.259.781.324,00	1.994.845.100.290,00	1.506.877.015.401,00	8.219.605.040.000,00	$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun 2024} - \text{Jumlah Investasi Tahun 2023}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2023}} \times 100\%$	14,54%
2024	1.604.377.300.310,00	2.291.823.401.130,00	2.338.257.601.021,00	3.383.455.051.219,00	9.617.913.353.680,00		

Gambar: Screenshoot reliasai investasi Kab. Simalungun Tahun 2024
 Sumber: DPMPTSP Kab. Simlaungun 2024



- Realisasi Investasi Periode Jan s.d Desember 2024	: Rp. 9.617.913.353.680,00
- Target 2024	: 6,50 %
- Realisasi Investasi 2024	: 14,54 %
	= $\frac{\text{Jumlah Investasi 2024} - \text{Jumlah Investasi 2023}}{\text{Jumlah Investasi Tahun 2023}} \times 100 \%$
	= $\frac{9.617.913.353.680,00 - 8.219.605.040.000,00}{9.617.913.353.680,00} \times 100 \%$
	: 14,54 %
- Capaian	: 223,69 %
	= $14,54 \% / 6,50 \% * 100 \%$
	= 223,69 %

Gambar: Perhitungan Investasi Kab. Simalungun
Sumber: DPMPTS Kab. Simalungun

Dalam rangka peningkatan kemudahan investasi dan kemudahan izin usaha di Kab. Simalungun DPMPTS Kab. Simalungun juga telah mendorong pelaku usaha untuk mengurus surat izin usaha seperti pada tabel berikut ini

Tabel 3.36

izin usaha yang diterbitkan oleh DPMPTS Kab. Simalungun

NO	NAMA NAMA IZIN	2024
1	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)	-
2	IZIN REKLAME (IR)	49
3	IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM (IPDU)	-
4	SURAT IZIN DOKTER UMUM	157
5	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI (IPDG)	-
6	SURAT IZIN DOKTER GIGI	30
7	SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP B)	805
8	SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP P)	489
9	SURAT IZIN KERJA PERAWAT (SIK P)	-
10	SURAT IZIN KERJA AHLI GIZI (SIK AG)	-
11	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT (SIK TKN)	54
12	SURAT IZIN RADIOLOGI DIAGNOSTIK (SIK RD)	12
13	SURAT IZIN KERJA RADIOLOGI	-
14	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIK TS)	20
15	SURAT IZIN KERJA SANITARIAN	-
16	SURAT IZIN KERJA TENAGA PEKARYA KESEHATAN	6
17	SURAT IZIN KERJA PERAWAT GIGI	13
18	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM	-
19	SURAT IZIN KERJA AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	31
20	PERSETUJUAN USAHA PERKEBUNAN PENGOLAHAN (IUP - P)	-
21	PERSETUJUAN USAHA INDUSTRI	-
22	PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG	-
23	PERSETUJUAN OPERASIONAL KLINIK	-
24	PERSETUJUAN LOKASI	-
25	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	-
26	PERSETUJUAN APOTEK	-
27	SURAT IZIN DOKTER SPESIALIS	72
28	SURAT IZIN KERJA APOTEKER	36
29	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAU OPTOMETRIS	1



NO	NAMA NAMA IZIN	2024
30	SURAT IZIN KERJA TENAGA FARMASI	-
31	PERSETUJUAN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK PENGHASIL	-
32	PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN	-
33	PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN	-
34	PERSETUJUAN TOKO OBAT	-
35	PERSETUJUAN TANDA DAFTAR GUDANG	-
36	PERSETUJUAN KOPERASI SIMPAN PINJAM	-
37	SURAT IZIN KERJA FISIOTERAPI	12
38	SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN	-
39	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	-
40	IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	-
41	PBG	-
42	SURAT IZIN KERJA ASISTEN NUTRISIONIST	24
43	TENAGA PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN	8
44	SURAT IZIN KERJA TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	65
45	SURAT IZIN KERJA PENATA ANASTESI	7
46	SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN	7
47	SURAT IZIN KERJA ELEKTROMEDIS	3
48	SURAT IZIN OPERASIONAL	82
49	SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS	1
50	SURAT IZIN KERJA TERAPIS WICARA	2
	JUMLAH	1.986

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Realisasi Beberapa tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	-	37.99	84.29	4.8	14.54	302 %

Kondisi iklim investasi di Kabupaten Simalungun dari tahun ke tahun cenderung membaik, tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan seperti terlihat pada tabel diatas. Meningkatnya iklim investasi ini tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholder* dan juga kemudahan syarat berinvestasi yang sudah di diterapkan baik melalui aplikasi dan juga website Dinas PMTSP Kabupaten Simalungun.



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.38
Perbandingan Meningkatnya Pengembangan Iklim Investasi Daerah tahun 2024 sampai dengan Target Akhir RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	14.54%	5.8	250%

Pencapaian Realisasi Persentase Investasi Daerah pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2023, tetapi jika melihat pada target yang akan disasar pada akhir RPJMD 2021-2026 maka realisasi Persentase Iklim Investasi Dearah telah melebihi dari target akhir RPJMD yakni 5,8, dengan demikian realiasi kinerja terhadap akhir RJMD adalah sebesar 14.54 dengan tingkat kemajuan capaian sebesar 250%

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.39
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	
1	Meningkatnya Kondusivitas Pengembangan Iklim Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	4.8	14.54	302 %	Realisasi yang di peroleh pada tahun 2024 melebihi dari target tahun 2024 dan juga target akhir RPJMD, hal ini di sebabkan pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DPMPPTS Kab. Simalungun terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi para pelaku usaha. Selain itu penerapan OSS dan juga sistem aplikasi online sangat memudahkan para pelaku usaha dan juga investor untuk membuka peluang udaha di Kab. Simalungun Walau demikian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 cenderung turun dibandingkan dngan tahun 2023, tetapi walau demikian Pemerintah Kabupaten Simalugungun terus berupaya meningkatkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi para pelaku usaha yang ingin menanamkan investasinya di Kab. Simalungun	-

**3.1.3.4. Sasaran 4, Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Tabel 3.40
Realisasi Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	7.49	7.72	97%	Samhat memuaskan	BPS
		Indeks Gini	Indeks	0.270	0.2950 (2023)	91%	Sangat Memuaskan	BPS
		Pendapatan Perkapita	Juta (RP)	53.90	57.60	106%	Sangat Memuaskan	BPS

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

4. Indikator 1: Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2024 persentase Tingkat kemiskinan Kabupaten Simalungun adalah sebesar 7,72% terhadap target yang di sasar adalah sebesar 7,49 dengan capaian sebesar 97%. Capainya ini diperoleh dengan membandingnya target denganr realisasi yang diperoleh. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. **Garis Kemiskinan Makanan (GKM)** merupakan nilai minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per



hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tabel 3.41
Realisasi dari Indikator Kemiskinan tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah/Total (000) jiwa/person	Persentase (%)
	2024	2024
(1)	(3)	(5)
KAB. NIAS	21,74	14,89
KAB. MANDAILING NATAL	40,56	8,69
KAB. TAPANULI SELATAN	19,90	6,92
KAB. TAPANULI TENGAH	49,21	11,80
KAB. TAPANULI UTARA	25,51	8,21
KAB. TOBA	15,03	8,07
KAB. LABUHAN BATU	42,45	7,84
KAB. ASAHAN	61,34	8,12
KAB. SIMALUNGUN	68,05	7,72
KAB. DAIRI	20,40	7,10
KAB. KARO	33,44	7,37
KAB. DELI SERDANG	84,24	3,44
KAB. LANGKAT	96,54	9,04
KAB. NIAS SELATAN	54,48	16,32
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	16,78	8,44
KAB. PAKPAK BHARAT	3,73	6,87
KAB. SAMOSIR	14,85	11,63
KAB. SERDANG BEDAGAI	43,00	6,97
KAB. BATU BARA	47,66	10,94
KAB. PADANG LAWAS UTARA	27,21	8,97
KAB. PADANG LAWAS	24,96	7,87
KAB. LABUHAN BATU SELATAN	29,19	7,73
KAB. LABUHAN BATU UTARA	34,00	8,98
KAB. NIAS UTARA	30,53	21,50
KAB. NIAS BARAT	18,78	22,68
KOTA SIBOLGA	9,99	11,39
KOTA TANJUNG BALAI	22,25	11,97
KOTA PEMATANG SIANTAR	18,97	7,20
KOTA TEBING TINGGI	15,31	8,79
KOTA MEDAN	187,04	7,94
KOTA BINJAI	13,86	4,75
KOTA PADANG SIDEMPUAN	14,88	6,23
KOTA GUNUNG SITOLI	22,16	14,72

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

5. Indikator 2: Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Simalungun masih menggunakan data tahun 2023, indeks gini pada tahun 2023 adalah sebesar 0.295 realisasi tahun 2023 ini melebihi target indeks gini 2024 yakni sebesar 0,270. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat



merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5

6. Indikator 3: Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk di suatu negara dalam satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk mengetahui pendapatan perkapita adalah dengan membandingkan antara PDRB dengan total jumlah penduduk. Untuk tahun 2024, pendapatan perkapitan Kab. Simalungun adalah sebesar 57.6 terhadap target tahun 2024 yakni 53.90 sehingga capaian dari Indikator Pendapatan Perkapita adalah sebesar 106%

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	-	8.26	7.87	7.49	7.72	97%
	Indeks Gini	-	0.2620	2.950	0.270	0.2950 (2023)	91%
	Pendapatan Perkapita	-	47.285	52.23	53.90	57.6	106%

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka 2025



- **Tingkat Kemiskinan**

Tabel 3.43
Tingkat KEmiskinan Kabupaten Simalungun
Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah/Total (000) jiwa/person		Persentase (%)	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. SIMALUNGUN	69,21	68,05	7,87	7,72

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

Angkat tingkat kemiskinan Kabupaten Simalungun dari tahun ketahun terus menurun, jika melihat pada data BPS dari tahun 2023-2024 cenderung mengalami penurunan, diharapkan untuk tahun tahun berikutnya angka kemiskinan di Kabupaten dapat diturunkan dengan Kerjasama dari semua stakeholder yang menjadi bagian dari penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Simalungun.

- **Indikator 2: Indeks Gini**

Indeks Gini Kabupaten Simalungun menggunakan data 2023 dan jika melihat dengan perbandingan dengan beberapa tahun terakhir yakni 2022 dan 2023 maka masih dibawah target yang akan di capai setiap tahunnya. Indeks gini sendiri yang merupakan ukuran statistic yang melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Jika melihat perbedaan antara tahun 2022 dan 2023 maka terjadi ketimpangan rasio gini yang semakin meningkat pada tahun 2023. Sedangkan untuk tahun 2024 yang masih menggunakan data 2023 juga masih terlihat ketimpangan gini dari yang terdapat pada tahun 2022 dan 2023



- **Indikator 3: Pendapatan Perkapita**

Pendapatan Perkapita Kabupaten Simalungun dalam 3 tahun terakhir yakni 2022-2024 mengalami tren Peningkatan. Pada tahun 2022 pendapatan perkapita Kabupaten Simalungun adalah sebesar 47.28, kemudia pada tahun 2023 adalah sebesar 52.23 dan pada tahun 2024 berada pada angka 58.09.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.72	7	97,2% (Akhir Renstra/Realisasi 2024)/100%
	Indeks Gini	0.2950	0,260	88% (Akhir Renstra/Realisasi 2024)/100%
	Pendapatan Perkapita	57.60	58,11	98%

- **Indikator Tingkat Kemiskinan**

Pada Indikator Tingkat Kemiskinan untuk target akhir RPJMD 2021-2026 indeks persentase angka kemsikinan yang akan di sasar adalah sebsar 7%. Pada tahun 2024 persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Simalungun adalah sebesar 7.72. realisasi tahun 2024 masih jauh dari target yang akan di sasara yakni sebesar 7%. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan dengan beberapa



program yang diharapkan dapat langsung menyentuh ke masyarakat di Kabupaten Simalungun.

- **Indikator Indeks Gini**

Pada target RPJMD Kab. Simalungun Indeks Gini yang akan di sasar adalah 2.60, pada tahun 2024 indeks gini Kabupaten Simalungun yang masih menggunakan data 2024 berada pada angka 0.2950. dengan demikian tingkat kemjuan realisasi Indeks Gini Tahun 2024 terhadap target akhir renstra adalah sebesar 88%

- **Indikator Pendapatan Perkapita**

Target RPJMD 2021-2026 yang akan disasar adalah sebesar 58.11, sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar 57.60 sehingga progress capaiannya adalah sebesar 98% terhadap target akhir renstra 2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Stanadar Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.72	9.03 % (Nasional 2024)	--
			7.19 (Sumatera Utara 2024)	-
	Indeks Gini	0.2950	0.381 (Nasional 2024)	-
			0.306 (Sumatera Utara 2024)	-
Pendapatan Perkapita	58.09	-	-	



- **Tingkat Kemiskinan**

Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi Kinerja dari Indikator
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Simalungun
dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota di
Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Jumlah/Total (000) jiwa/person		Persentase (%)	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. NIAS	21,99	21,74	15,10	14,89
KAB. MANDAILING NATAL	41,04	40,56	8,86	8,69
KAB. TAPANULI SELATAN	20,09	19,90	7,01	6,92
KAB. TAPANULI TENGAH	47,09	49,21	11,50	11,80
KAB. TAPANULI UTARA	26,39	25,51	8,54	8,21
KAB. TOBA	14,94	15,03	8,04	8,07
KAB. LABUHAN BATU	42,58	42,45	7,99	7,84
KAB. ASAHAN	61,69	61,34	8,21	8,12
KAB. SIMALUNGUN	69,21	68,05	7,87	7,72
KAB. DAIRI	21,42	20,40	7,47	7,10
KAB. KARO	35,65	33,44	7,98	7,37
KAB. DELI SERDANG	82,75	84,24	3,44	3,44
KAB. LANGKAT	98,16	96,54	9,23	9,04
KAB. NIAS SELATAN	54,29	54,48	16,39	16,32
KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	17,14	16,78	8,69	8,44
KAB. PAKPAK BHARAT	4,01	3,73	7,54	6,87
KAB. SAMOSIR	14,86	14,85	11,66	11,63
KAB. SERDANG BEDAGAI	45,88	43,00	7,44	6,97
KAB. BATU BARA	49,18	47,66	11,38	10,94
KAB. PADANG LAWAS UTARA	26,17	27,21	8,79	8,97
KAB. PADANG LAWAS	24,51	24,96	7,89	7,87
KAB. LABUHAN BATU SELATAN	29,83	29,19	8,06	7,73
KAB. LABUHAN BATU UTARA	34,13	34,00	9,08	8,98
KAB. NIAS UTARA	30,78	30,53	21,79	21,50
KAB. NIAS BARAT	18,86	18,78	22,81	22,68
KOTA SIBOLGA	10,02	9,99	11,42	11,39
KOTA TANJUNG BALAI	22,45	22,25	12,21	11,97
KOTA PEMATANG SIANTAR	18,96	18,97	7,24	7,20
KOTA TEBING TINGGI	16,36	15,31	9,49	8,79
KOTA MEDAN	187,28	187,04	8,00	7,94
KOTA BINJAI	13,85	13,86	4,79	4,75
KOTA PADANG SIDEMPUAN	16,15	14,88	6,85	6,23
KOTA GUNUNG SITOLI	22,03	22,16	14,78	14,72

Sumber: BPS, (Simalungun Dalam Angka 2024)



- **Indikator 2: Indeks Gini**

Target rasio gini dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2024 ditetapkan sebesar 0,374-0,377. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini dibawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5

- **Indikator Pendapatan Perkapita**

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.47
Analisis Realisasi Kinerja Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7.49	7.72	97%	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya menjaga inflasi daerah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi di masyarakat • Selain itu pemerintah kabupaten Simalungun Melaksanakan Koordinasi dengan 	-



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	
						Forum CSR berkaitan dengan Penyaluran Bantuan Kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Kabupaten Simalungun juga melakukan Rekonsiliasi data penduduk miskin dan pemutakhiran data sasaran 	
		Indeks Gini	0.270	0.2950 (2023)	91%	Faktor-faktor seperti ekonomi dan akses jalan dalam kondisi mantap yang belum sepenuhnya merata terbangun di Kab. Simalungun, sehingga ini menyebabkan ketimpangan ekonomi seperti akses petani untuk mengeluarkan hasil produksi pertanian juga terganggu sehingga mengakibatkan biaya produksi juga bertambah	Pemerntah Kab. Simalungun terus berupaya memperbaiki jalan yang kurang baik menjadi jalan yang dalam kondisi mantap, sehingga akan berdampak baik bagi masyarakat. Tidak hanya memudahkan masyarakat dalam sisi perekonomian namun juga akan semakin mudah di akses bagi masyarakat dalam mengakses layanan Kesehatan dan juga pendidikan
		Pendapatan Perkapita	53.90	58.90	109%	Keberhasilan realsiasi dari indikator pendapatan perkapita pada tahun 2024 tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai macam upaya diantaranya peningkatan UKM dan Juga bantuan kemudahan berusaha yang berdampak pada peningkatan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat.	



3.1.3.5. Sasaran 5, Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja

➤ Indikator 1: Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 3.48
Realisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.19	6.12	65%	Cukup	BPS

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja tahun 2004

Tabel 3.49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	TPAK Employment Participant Rate 2024	TPT Unemployment Rate 2024
1	2	3
KAB. SIMALUNGUN	71,31	6,12

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

.Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Simalungun berada pada angka 6.12 dari target yang akan disasar pada tahun 2024 adalah sebesar 4.19 dengan capaian sebesar 65%. Pengangguran terbuka umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Ketenagakerjaan berupaya menekan angka pengangguran melalui pelatihan bagi para pencari kerja, sehingga para pencari kerja yang telah memiliki



sertifikat yang berstandar siap untuk diterima dan ditempatkan di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Simalungun bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP).

Pelatihan Berbasis Kompetensi sendiri adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja. Pelaksanaan PBK ini lebih mengedepankan penguasaan kemampuan vokasional yang menjadikan peserta siap untuk bekerja.

Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan menargetkan sebanyak 528 orang yang akan mengikuti PBK namun yang terealisasi sebanyak 483 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan anggaran dari APBD sebanyak 16 paket
2. Pendidikan dan pelatihan Bahasa Jerman Level A1-B1 dengan anggaran APBD sebanyak 50 orang
3. Pendidikan dan pelatihan Bahasa Korea Epsa-Topik menuju penempatan G to G Negara Korea Selatan sebanyak 100 orang
4. Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan anggaran cost sharing dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan sebanyak 32 orang
5. Pemagangan dalam negeri sebanyak 45 orang



Gambar 1: Pelatihan Kerja Bagi Pencari Kerja di Balai Pelatihan Kerja
Gambar 2: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja di SMK Cipto Mangunkusumo Kec. Bandar, Kab. Simalungun

Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan penghargaan Paritrana Award. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan ini diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan utama penghargaan ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan mendorong terwujudnya cakupan keseluruhan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Beberapa indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah:

- Tingginya kepedulian dan partisipasi aktif perusahaan dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
- Komitmen dalam hubungan kerja dan perlindungan pekerja oleh perusahaan dan jasa layana



Gambar : Penerimaan penghargaan PARITRANA Award Tahun 2024.

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.50
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,17	5,51	4.19	6.12	65%

Sumber: BPS (Simalungun Dalam Angka, 2025)

Dari tabel diatas, Tingkat pengangguran terbuka kabupaten simalungun jika di bandingkan dengan beberapa tahun terakhir semakin besar angkanya, jika tahun 2022 TPT adalah sebesar 4.17, untuk tahun 2023 TPT adalah sebesar 5.51 dan pada tahun 2024 adalah sebesar 6.12. Beberapa faktor meningkatnya TPT diantaranya adalah melemahnya pertumbuhan ekonomi, kesenjangan keterampilan dalam kemampuan bekerja dan juga tingkat kemiskinan.



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.51
Relisasi Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dengan akhir RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (4) / (3) \times 100\%$
Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.12	4	65%

Pada tabel diatas ditunjukkan bahwa target dari Tingkat Pengangguran Terbuka yang terdapat pada akhir RPJMD 2026 adalah sebesar 4%, sedangkan pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran terbuka adalah sebesar 6.12 dengan demikian tingkat kemajuan realisasi tahun 2024 dari Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap akhir Rencana Strategis adalah sebesar 65%.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Realisasi Provinsi dan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Utara

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja terhadap Provinsi Sumatera Utara dan Beberapa Kab/Kota di Sumatera Utara

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	TPAK <i>Employment Participant Rate</i> 2024	TPT <i>Unemployment Rate</i> 2024
1	2	3
KAB. ASAHAN	67,64	5,94
KAB. SIMALUNGUN	71,31	6,12
KAB. KARO	84,13	2,40
KAB. DELI SERDANG	67,57	8,02
KAB. SERDANG BEDAGAI	67,75	4,88



Kabupaten/Kota Regency/Municipality	TPAK Employment Participant Rate 2024	TPT Unemployment Rate 2024
KAB. BATU BARA	72,01	5,75
KOTA PEMATANG SIANTAR	71,82	8,00
KOTA TEBING TINGGI	66,48	6,18
KOTA MEDAN	66,44	8,13
SUMATERA UTARA	71,36	5,60

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

**Tabel 3.53
Analisis Keberhasilan/Kegagalan dari Relisasi Kinerja Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.19	6.12	65%	Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya untuk menekan angka Tingkat pengangguran Terbuka diantaranya dengan menggalakkan peningkatan UKM dan juga pelatihan bagi pencari kerja produktif untuk bisa bersaing di dunia kerja, selain itu UKM yang merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi terus di galakkan agar terus menciptakan lapangan kerja.	<p>Untuk mengurangi dan menekan TPT, Pemerintah kabupaten Simalungun mengambil Langkah seperti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuka lapangan pekerjaan di sektor industri padat karya • Memberikan program pelatihan kerja • Memberikan kemudahan pinjaman untuk pelaku usaha • Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan tingkat pendapatan penduduk desa • Menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
							<p>meningkatkan akses jalan yang baik dan dalam kondisi mantap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur baik jalan, Pendidikan dan Kesehatan • Memberikan dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

3.1.3.6. Sasaran 6, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.54
Maningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.18	75.88	100.9%	Samhat memuaskan	BPS (IPM KAB. Simalungun 2024)
		Indeks Kesehatan	Indeks	80.11	79.85	99%	memuaskan	Dinas Kesehatan Pemkab. Simalungun

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

- **Indikator 1: Indeks Pembangunan Manusia**

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap



sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain meliputi kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat berlaku di semua wilayah atau negara.

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Manfaat penting IPM antara lain sebagai berikut:

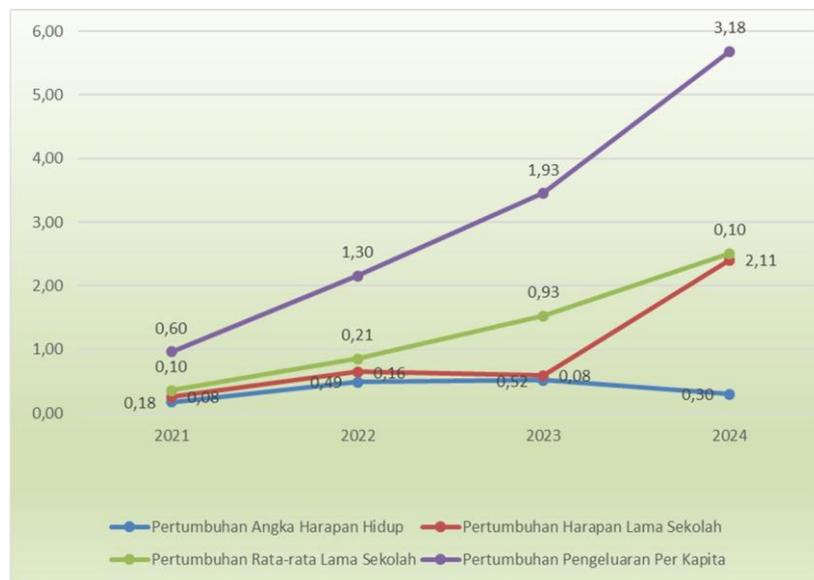
- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan tiga indikator utama, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per Kapita



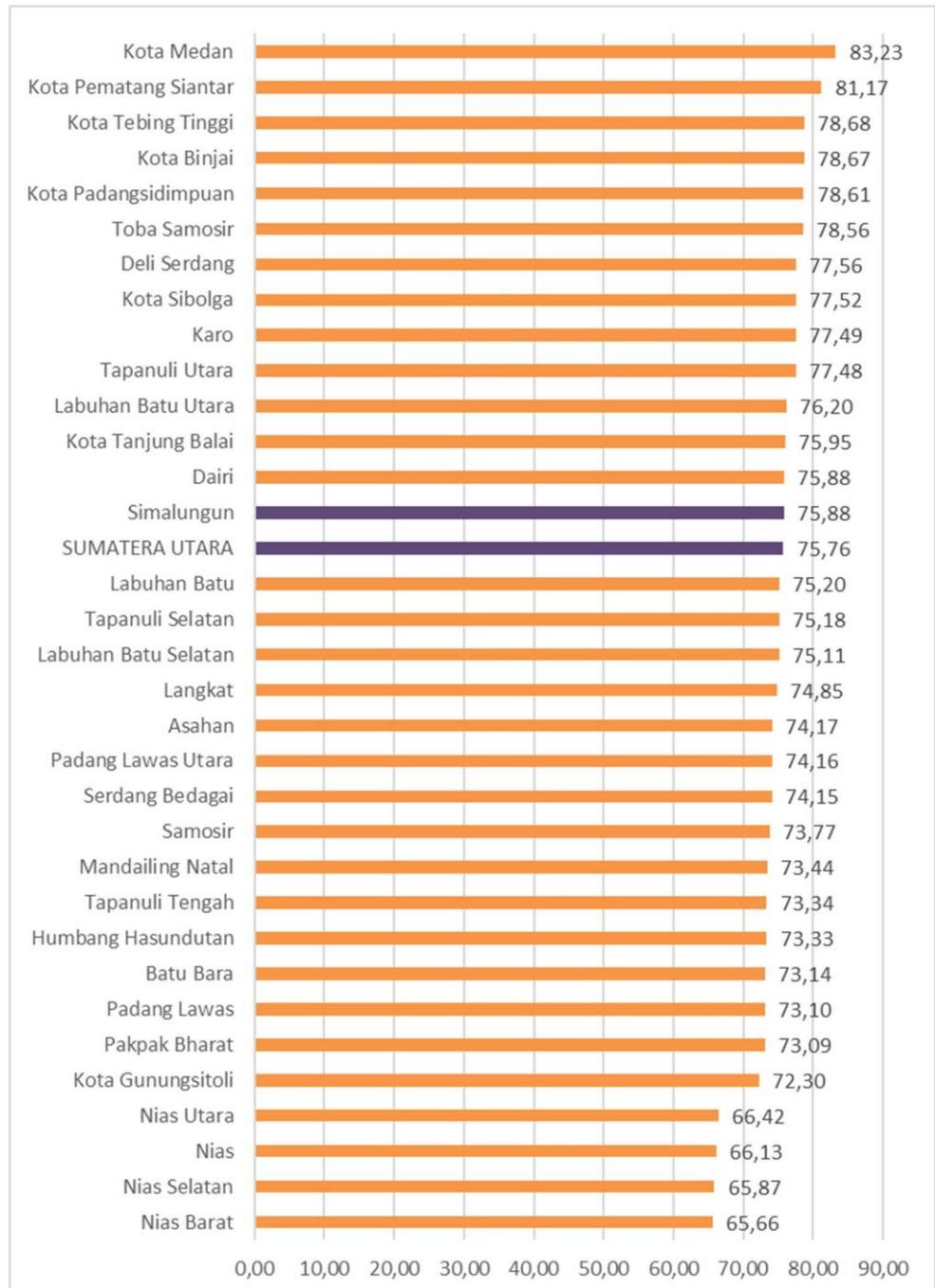
Tabel 3.55
Indikator Utama Pendukung IPM Tahun 2024

No	Indikator	Skor
1	2	3
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	74.30 (Tahun)
2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	13.49 (Tahun)
3	Rata-rata lama sekolah	9.12 (Tahun)
4	Rata Rata Pengeluaran Perkapita	12.12 (Juta)



Gambar: Pertumbuhan Komponen Pembentuk IPM Simalungun, 2021-2024
Sumber : BPS (IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2024)

IPM Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 berada pada angka 75.88, skor indeks ini diatas target dari Perjanjian Kinerja Bupati Simalungun pada tahun 2024. IPM Kabupaten Simalungun yang berada pada angka 75.88 berada di urutan ke 14 (empatbelas) dari 32 kabupaten/kota yang ada di provinsi sumatera utara



(Sumber: BPS(IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2024)

- **Indikator 2: Indeks Kesehatan**

Tahun 2024 Realisasi Indeks Kesehatan Kabupaten Simalungun adalah sebesar 79.85, hasil ini 0.1 Point dibawah target. Indeks Kesehatan diperoleh dengan beberapa indikator pendukung diantaranya harapan hidup, prevalensi penyakit, dan akses sanitasi. Berdasarkan Buku Simalungun Dalam Angka 2025,



Pada tahun 2024 Angka harapan Hidup Kabupaten Simalungun berada pada angka 74,08.

Kabupaten Simalungun Melalui Dinas Kesehatan Berupaya meningkatkan taraf Kesehatan masyarakat dengan beberapa program seperti peningkatan Imunisasi, Prevelansi Stunting dan menekan angka kematia Ibu dan Bayi.

Tabel 3.56
Sebaran Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
Tahun 2024

NO	LOKASI FASKES	SURVIVING INFANT	IMUNISASI LENGKAP
1	Saribu Dolok	280	282
2	Pamatang Raya	426	478
3	Tanah Jawa	511	463
4	Huta Bayu	284	398
5	Raja Maligas	154	155
6	Panei Tongah	307	267
7	Pamatang Sidamanik	331	255
8	Sarimatondang	434	219
9	Sipintu Angin	163	115
10	Tiga Dolok	256	235
11	Perdagangan	810	742
12	Bandar Masilam	241	206
13	Pematang Bandar	185	84
14	Kerasaan	293	277
15	Sindar Raya	215	153
16	Silou Malaha	235	137
17	Batu Anam	352	335
18	Simpang Bahjambi	429	421
19	Tiga Balata	233	177
20	Parapat	246	187
21	Tiga Runggu	455	252
22	Haranggaol	70	50
23	Serbelawan	630	549
24	Nagori Dolok	268	248
25	Bosar Maligas	388	370
26	Ujung Padang	528	416
27	Saran Padang	170	178
28	Tapian Dolok	603	357
29	Gunung Maligas	480	438



NO	LOKASI FASKES	SURVIVING INFANT	IMUNISASI LENGKAP
30	Hatonduhan	202	126
31	Bandar Huluan	410	259
32	Jawa Maraja	310	281
33	Panombean Panei	351	384
34	P. Silimahuta	204	246
35	Bah Bolon	215	156
36	Parbutaran	275	244
37	Marihat Bandar	200	347
38	Cingkes	88	76
39	Sayur Matinggi	197	178
40	Bandar Siantar	202	245
41	Bandar Tinggi	254	142
42	Rambung Merah	362	299
43	Marubun Jaya	306	290
44	Buntu Turunan	175	129
45	Sinasih	47	23
46	Bah Tonang	69	95
TOTAL		13844	11964
UCI		86,42%	

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Sementara itu pada Prevalansi Stunting yang ditunjukkan kepada balita untuk tahun 2024 berada pada angka 0,0025 dan 0,0079.

Tabel 3.57
Relisasi Prevalansi Stunting pada Balita

Prevalansi Stunting	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	0,15	0,0025	98%
Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita	0,77	0,0079	99%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025



b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.58
Perbandingan antara Realisasi Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	73.77	75.17	75.18	75.88	100.9%
	Indeks Kesehatan	71.78	65.83	80.11	79.85	99%

- **Indikator Indeks Pembangunan Manusia**

Ideks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2022-2024 mengalami trend yang positif dengan realisasi diatas target yang telah di tetapkan di dalam perjanjian kinerja Bupati Simlaungun tahun 2024, peningkatan ini tidak terlepas semakin membaiknya beberapa indikator pendukung dari IPM seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pengeluaran per Kapita. Diharapkan untuk tahun tahun berikutnya tren juga semakin berlanjut dan membaik.

- **Indikator Indeks Kesehatan**

Indeks Kesehatan Kabupaten Simalungun pada tahun 2022-2024 cenderung meningkat, untuk tahun 2022 adalah sebesar 71.78 kemudian untuk tahun 2023 sebesar 65.83 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar 79.85. peningkatan ini tidak terlepas dari upaya Kabupaten Simalungun yang serius untuk meningkatkan Indeks Kesehatan dengan meingkatkan akses Kesehatan di desa-desa dan juga memperbaiki infrastruktur dari mulai perbaikan jalan yang akan



memudahkan masyarakat menuju ke pusat Kesehatan terdekat yang di sediakan oleh pemerintah dan juga layana Kesehatan juga yang terus di tingkatkan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.59
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.88	76.09	99%
	Indeks Kesehatan	79.85	80.76	98%

- **Indeks Pembangunan Manusia**
pada tahun 2024 yang mendapatkan skor indeks sebesar 85.88 terhadap target akhir renstra sebesar 76.09 mengalami peningkatan indeks secara perlahan. Pemerintah Kabupaten Simalungun Optimis bahwa IPM akan tercapai sesuai dengan target sampai dengan akhir RPJMD yakni 76.09
- **Indikator Kesehatan**
Pada target akhir renstra indikator Kesehatan yang akan dicapai adalah sebesar 80,76, untuk tahun 2024 realisasi yang di peroleh adalah sebesar 79,85 sehingga capaian yang di peroleh terhadap akhir renstra adalah sebesar 98%.



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Provinsi Sumatera Utara dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.88	1. 75.02 (Nasional) 2. 75.13 (Sumatera Utara)	1. 101% 2. 100%
	Indeks Kesehatan	-		

- **Indikator IPM**

Realisasi IPM Pemerintah Kabupaten Simalungun berada diatas realisasi IPM Nasional yakni 75.02 pada tahun 2024, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi IPM Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 75.13. berdasarkan data BPS (IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2024) Kabupaten Simalungun berada di urutan 14 (empat belas) sedangkan Provinsi Sumatera Utara di urutan ke 15 (limabelas)

- **Indeks Kesehatan**

Untuk perbandingan Indeks Kesehatan dengan Standar Nasional Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untuk pencapaian Persentase Peningkatan Investasi Daerah



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

**Tabel 3.61
Analisis Penyebab Keberhasilan dan kegagalan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	75.18	75.88	100.9%	Keberhasilan realisasi dari IPM dengan indeks 75.88 tidak terlepas dari semakin meningkatnya beberapa indikator pendukung dari IPM. Indikator indikator tersebut semakin membaik dengan beberapa program dari pemerintah Kabupaten Simalungun diantaranya Peningkatan Kayanan Kesehatan, pembangunan Jalan yang adil. Salah satu kedua program tersebut mampu meningkatkan taraf Pendidikan dan Kesehatan yang ada di Kabupaten Simalungun	-
		Indeks Kesehatan	80.11	79.85	99%	Beberapa indikator pembangunan Indeks Kesehatan terus di tingkatkan Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kesehatan diantaranya Imunisasi bagi balita, dan kesadaran masyarakat akan Kesehatan lingkungan dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan perasan serta masyarakat dalam membangun lingkungan dan keluarga sehat - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi kepada bayi dan balita - Serta meningkatkan akses Kesehatan di kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait.



3.1.3.7. Sasaran 7, Meningkatkan Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender

Tabel 3.62
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan yang Berkeadilan dan Kesetaraan gender

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumbe Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	Indeks	70.17	93.00 (2023)	132%	Sangat memuaskan	Dinas Pendidikan Kab. Simalungun
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.08	93.09 (2023)	93.09 (2023)	Sangat memuaskan	BPS

a) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan target Tahun 2024

- **Indikator 1: Indeks Pendidikan**

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan dihitung untuk mengetahui kondisi pendidikan suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada tahun 2024 Indeks Pendidikan Kabupaten Simalungun berada pada angka 93.00 dengan capaian 132%. Hasil ini didapat dari beberapa sub indikator seperti angka melek huruf dan rata rata lama sekolah. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui dinas Pendidikan Kab. Simalungun terus meningkatkan kualitas Pendidikan seperti Peningkatan Kualitas APK PAUD, SD dan SMP dan peningkatan Kualitas Tenaga



Pendidik dan tenaga Kependidikan. APK Paud dan SD SMP adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan PAUD, SD, dan SMP. APK adalah perbandingan antara jumlah anak sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK dinyatakan dalam persentase.

Tabel 3.63
Jumlah Sekolah PAUD Tahun 2024

No	Jenis PAUD	Jlh. Lembaga	Jumlah Siswa PAUD (Org)		Jumlah
			LK	PR	
1	Taman Kanak-kanak (TK)	143	2.969	2.831	5.800
2	Kelompok Bermain (KB)	298	4.293	4.283	8.576
3	Tempat Penitipan Anak (TPA)	1	-	-	-
4	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	6	42	40	82
Jumlah		448	7.304	7.154	14.458

Sumber : Dinas Pendidikan Thn.2024

Tabel 3.64
Jumlah Sekolah Dasa dan SMP di Kabupaten Simalungun Tahun 2024

No	Jenjang Sekolah	Status Sekolah			Siswa (Org)		
		Neg.	Swst.	Jlh.	Lk	Pr	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	744	69	813	44.996	41.805	86.801
2	S M P	65	94	159	18.631	17.481	36.112
Jumlah		809	163	972	63.627	59.286	122.913

Sumber : Dinas Pendidikan Thn.2024

Tabel 3.65
Jumlah Tenaga Pendidik Kab. Simalungun Tahun 2024

No.	Jabatan Guru Pada Jenjang Sekolah	STATUS		JLH
		PNS	NON PNS	
1	Guru PAUD/TK	17	405	422
2	Guru SD	3.391	613	4.004
3	Guru SMP	976	271	1.247
JUMLAH		4.384	1.289	5.673
% (Porsentase)		77,27%	22,72%	88,16

Sumber: Dinas Pendidikan tahun 2024



- **Indikator 2: Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. IPG juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci seperti, Kesehatan, Pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Selain itu IPG juga merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Pada tahun 2024 realisasi dari IPG Kabupaten Simalungun masih menggunakan data dari IPG pada tahun 2023. Jika mengacu pada data 2023 maka capaian dari indikator IPG adalah sebesar 100%, kemudian jika melihat dari besaran realisasi maka kabupaten simalungun sudah mencapai dari target IPG yang di tetapkan pada RPJMD 2021-2026

Tabel 3.66
IPG Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Kota di Sumatera Utara Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	2023
1	2
SUMATERA UTARA	91,31
Nias	91,05
Mandailing Natal	93,68



Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	2023
Tapanuli Selatan	90,63
Tapanuli Tengah	95,23
Tapanuli Utara	97,75
Toba Samosir / Toba	98,32
Labuhan Batu	90,74
Asahan	91,91
Simalungun	93,09
Dairi	98,44
Karo	96,36
Deli Serdang	91,92
Langkat	88,77
Nias Selatan	89,68
Humbang Hasundutan	97,45
Pakpak Bharat	98,99
Samosir	96,74
Serdang Bedagai	88,87
Batu Bara	83,76
Padang Lawas Utara	88,26
Padang Lawas	86,56
Labuhan Batu Selatan	88,34
Labuhan Batu Utara	90,43
Nias Utara	80,51
Nias Barat	87,33
Kota Sibolga	98,01
Kota Tanjung Balai	90,53
Kota Pematang Siantar	95,94
Kota Tebing Tinggi	93,64
Kota Medan	94,13
Kota Binjai	90,99
Kota Padangsidimpuan	97,53
Kota Gunungsitoli	89,92

Sumber: BPS Sumatera Utara



b) Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.67
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	-	93.00	93.00	70.17	93.00	132%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	93.19	93.09	93.08	93.09 (2023)	100%

- **Indeks Pendidikan**

Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Simalungun dari tahun 2022-2024 cenderung stabil dengan masing masing realisasi di setiap tahunnya adalah 93.00, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pendidikan terus berupaya meningkatkan kualitas Pendidikan baik infrastruktur Pendidikan dan juga tenaga Pendidikan. Kedua hal tersebut merupakan salah satu pendorong kualitas Pendidikan di tahun tahun berikutnya.

- **Indeks Pembangunan Gender**

IPG yang merupakan salah satu indikator yang Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Jika melihat pada data tabel perbandingan antara tahun 2022,2023 dan 2024 maka kabupaten simalungun menunjukkan tren indeks yang positif dengan semakin kecilnya angka persentase dari sakla 100.



Tabel 3.68
IPG Kabupaten Simalungun dan Kab/Kota
di Sumatera Utara

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2022	2023
SUMATERA UTARA	91,06	91,31
Nias	91,28	91,05
Mandailing Natal	93,42	93,68
Tapanuli Selatan	90,99	90,63
Tapanuli Tengah	94,95	95,23
Tapanuli Utara	98,16	97,75
Toba Samosir / Toba	98,51	98,32
Labuhan Batu	90,81	90,74
Asahan	91,93	91,91
Simalungun	93,16	93,09
Dairi	98,15	98,44
Karo	96,38	96,36
Deli Serdang	91,61	91,92
Langkat	89,03	88,77
Nias Selatan	89,19	89,68
Humbang Hasundutan	97,65	97,45
Pakpak Bharat	99,25	98,99
Samosir	96,76	96,74
Serdang Bedagai	89,19	88,87
Batu Bara	83,51	83,76
Padang Lawas Utara	88,1	88,26
Padang Lawas	86,24	86,56
Labuhan Batu Selatan	87,98	88,34
Labuhan Batu Utara	90,13	90,43
Nias Utara	80,12	80,51
Nias Barat	87,02	87,33
Kota Sibolga	97,9	98,01
Kota Tanjung Balai	90,28	90,53
Kota Pematang Siantar	95,96	95,94
Kota Tebing Tinggi	93,62	93,64
Kota Medan	93,85	94,13
Kota Binjai	90,64	90,99
Kota Padangsidempuan	97,92	97,53
Kota Gunungsitoli	89,69	89,92

Sumber: BPS, Sumatera Utara Dalam Angka, 2023



c) Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender dengan Akhir Tareger RPJMD Tahun 2026

Tabel 3.69
Perbandingan realisasi Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	93.00	71.56	129%
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.09 (2023)	93.15	99%

- **Indikator Indeks Pendidikan**

Jika melihat pada rencana akhir RPJMD tahun 2026 besaran angka dari indek Pendidikan yang akan di sasar adalah sebesar 71.56 sedangkan realisasi untuk tahun 2024 adalah sebesar 93.00. dengan demikian tingkat kemajuan dari Indikator Pendidikan tahun 2024 terhadap target akhir renstra 2026 adalah sebesar 99%

- **Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Indeks Peembangunan Gender Tahun 2024 yang masih menggunakan data 2024 adalah 93.09 jika di bandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 93.15 adalah 99%. Hasil ini bisa dikatakan sangat memuaskan karena sudah mendekati target dari RPJMD, Hal ini juga menunjukkan bahwa perbandingan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan sudah sangat baik.



d) Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Gender

e) Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.70
Analisis Keberhasila/ Kegagalan Realisasi Kinerja Meningkatnya kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	
1	Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pendidikan	70.17	93.00	132%	Jika melihat pada capaian indikator Pendidikan tahun 2024 maka capain yang diperoleh adalah sebesar 132% dengan realisasi yang didapat 93% dari target yang seharusnya di sasar adalah 70.17, keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah kabupaten Simalungun dengan meningkatkan infrastur Pendidikan dan juga peningkatan kualitas tenaga pendidik Selain itu pendukung dari infrastuktur	-



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
						Pendidikan diantaranya adlaah semakin baiknya akses ke sarana Pendidikan berupa kualitas jalan yang semakin baik yang memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana Pendidikan yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas Pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat baik Pendidikan dan juga kesehatan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.08	93.09 (2023)	100%	IPG adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki daam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi, Keberhasilan dari indikator dilihat dari data yang sama dari data tahun 2023

3.1.3.8. Sasaran 8, Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif

- Indikator 1: Indeks Pembangunan Pemuda

Tabel 3.71
Relisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumbe Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	60.00	49.55	82%	Memuaskan	Kemenpora.go.id



a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif

Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Simalungun untuk tahun 2024 adalah sebesar 49.55 dengan capaian atas target taun 2024 adalah sebesar 82%. Indikator untuk menghitung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesempatan kerja.

Aspek-aspek IPP

- Pendidikan
- Kesehatan dan kesejahteraan
- Lapangan dan kesempatan kerja
- Partisipasi dan kepemimpinan
- Gender dan diskriminasi
- Pembangunan individu
- Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan
- Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan

Membangun pemuda tidak hanya membangun individu pemuda, karena itulah dikembangkan pula lapisan lainnya yaitu lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka yaitu lapisan penghidupan dan kesejahteraan. Pemuda juga perlu dilibatkan dalam berbagai bidang kehidupan terutama pada aspek partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender. Keterlibatan pemuda sebagai subjek pembangunan menjadi bagian penting untuk memaksimalkan peran pemuda sebagai agen kunci perubahan sosial, pembangunan ekonomi dan juga inovasi teknologi. Sejarah menunjukkan peran pemuda sebagai subjek dalam pelbagai perubahan sosial di Indonesia. Pemuda juga tak sedikit yang telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi.



**INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)
KABUPATEN SIMALUNGUN**

NO	INDIKATOR	BATAS MIN	BATAS MAX	NILAI INDIKATOR	TRANFORMASI		NILAI INDIKATOR	NILAI DOMain	KET
					PERSAMAAN I	PERSAMAAN II			
DOMAIN PENDIDIKAN									
1	Rata - rata lama sekolah	0	15	12,81	8,54		8,54		
2	APK Sekolah Menengah	0	100	100	10		10		
3	APK Perguruan Tinggi	0	100	64,31	6,41		6,41		
								63,94	
Domain Kesehatan dan Kesejahteraan									
4	Angka Kesakitan Pemuda	0	20	9,9	0,51		0,51		
5	Presentasi Pemuda korban kejahatan	0	3	0,1	0,97		0,97		
6	Presentasi Pemuda merokok	0	36	4,84	0,87		0,87		
7	Presentasi pemuda yang sedang hamil	0	45	0,63	0,97		0,97		
								8,30	
Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja									
8	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	0	2	2,64	13,20		13,20		
9	TPT pemuda	0	28	10,71	0,62		0,62		
								69,09	
Domain Partisipasi dan Kepemimpinan									
10	Persentase Pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	72,65	7,26		7,26		
11	persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	30,27	6,73		6,73		
12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	21,19	8,48		8,48		
								74,9	
Domain Gender dan Diskriminasi									
13	Angka perkawinan usia anak	0	45	6,3	0,86		0,86		
14	persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	25	100	35,7	1,43		1,43		
15	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	43,28	7,16		7,16		
								31,5	
								49,55	

Sumber: Dispora Kab. Simalungun 2025

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

**Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas dan kemandirian Pemuda yang kompetitif Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir**

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	-	-	-	60.00	49.55	82%



Pada tahun 2024 realisasi IPP Kabupaten Simalungun adalah sebesar 49.55 dari target tahun 2024 yakni 60.00. sedangkan Nilai Realiasi Indeks Pemabungan Pemuda pada tahun 2021-2023 tidak dapat dimunculkan, hal ini dikarenakan ada beberapa indikator pendukung untuk penghitungan IPP yang tidak diperoleh hasilnya sehingga Nilai IPP pada tahun tahun tersebut juga tidak dapat dimunculkan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.73
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	49.55	67	73%

Tingkat kemajuan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2024 atas akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebesar 73%. Hal ini diperoleh dengan membandingkan Relisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap target akhir renstra sebesar 67 (indeks).



d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Tabel 3.74
Relisasi Kinerja Meningkatnya Produktivitas Dan Kemandirian Pemuda Yang Kompetitif Dengan Target Nasional Dan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi / Kabupaten / Kota Lainnya	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	49.55	56,33	87%
			56,33	87%

Perbandingan realisasi kinerja meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terhadap target nasional dan provinsi sumaterre utara tahun 2024 adalah 56,33 untuk perbandingan nasional dan 56.33 juga terhadap provinsi dengan capaian masing masing adalah sebesar 87%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.75
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Realisasi Kinerja Meningkatnya produktivitas dan kemandirian pemuda yang kompetitif sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	solusi
1	Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif	Indeks Pembangunan Pemuda	60.00	49.55	82%	Tidak tercapainya target dari IPP tahun 2024 disebabkan beberapa faktor diantaranya • Kurangnya	- Memanfaatkan organisasi kepemudaan - Memanfaatkan program pelatihan kewirausahaan



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	solusi
						kesempatan kerja • Kurangnya minat dan kepercayaan diri pemuda • Kurangnya kesempatan berpendapat • Kurangnya wawasan dan pemahaman mengenai pola hidup sehat • Kurangnya data kepemudaan yang komprehensif	- Memanfaatkan dialog dan koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah - Menyiapkan data kepemudaan yang komprehensif dan diperbarui secara berkala - Memfasilitasi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan

3.1.3.9. Sasaran 9, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 3.76
Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC (61.67)	62.47 (CC)	102.4%	Sangat Memuaskan	(LHE Reformasi Birokrasi kabupaten Simalungun Tahun 2024
		Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	CC (60.00)	CC (52.12)	86%	Memuaskan	esr.menpan.go.id
		Opini BPK	-	WTP	WTP (2023)	100%	Memuaskan	BPK RI
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75.00	70.512	94%	Memuaskan	Ipkd-bpp.kemndagri.go.id

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

• Indikator 1: Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							-Penetapan target atas Kegiatan Utama belum sepenuhnya dilaksanakan pada target Reformasi Birokrasi nasional (Keppres nomor 102 Tahun 2024). Terdapat target nasional atas indikator Kegiatan Utama Mandatory yang belum ditetapkan sebagai target instansi	-Memastikan target atas Kegiatan Utama memperhatikan target Reformasi Birokrasi nasional (Keppres nomor 102 Tahun 2024). Memastikan indikator Kegiatan Utama Mandatory sesuai dengan target nasional. Memastikan

Indikator Reformasi Birokrasi Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 mengalami peningkatan indeks dari yang semula 45.17 (C) menjadi 62,47 (B), realisasi ini melebihi target 2024 yakni 61,67 (B). Berdasarkan Laporan hasil evaluasi oleh Kekenpan-RI ada beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki didalam RB General dan Juga RB Tematik. Rekomendasi-rekomendasi tersebut harus diperbaiki di tahun berikutnya.

• Indikator 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) realisasi kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 52.12 untuk Tahun 2024. Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan kepada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akan tetapi masih banyaknya Perangkat Daerah belum mengacu kepada sistem yang berlaku, walaupun pelaporan kinerjanya telah di laporkan

Berdasarkan hasil Evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Simalungun oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2024 menunjukkan secara umum Pemerintah Kabupaten Simalungun belum secara intensif melakukan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Komponen-komponen AKIP berdasarkan hasil Evaluasi masih mengandung banyak kelemahan meliputi :

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) baik pada tingkat Pemda maupun PD. Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun rencana aksi dan pohon kinerja ada level Pemda dan PD.

Namun demikian masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. Dokumen PK Tahun 2024 belum disampaikan secara lengkap sampai level terendah, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana penjenjangan kinerja secara keseluruhan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;



- b. Terdapat sasaran strategis yang belum menggambarkan kinerja yang sesuai dengan jabatannya. Contohnya pada PK Bupati Simalungun Tahun 2024, yaitu sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif” dengan indikator “Jumlah Prestasi Olahraga” dan “Indeks Pembangunan Pemuda” serta sasaran strategis “Terwujudnya Masyarakat Tangguh Bencana” dengan indikator “Rasio Nagori/Kelurahan Tangguh Bencana”
- c. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang berkualitas. Contohnya PK Kepala BAPPERIDA Tahun 2024 pada sasaran strategis “tersedianya data/inforasi perencanaan pembangunan” dan 4 indikator lainnya. Contoh lainnya PK Kepala Dinas Pendidikan Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “peningkatan saran dan prasarana sanitasi Covid-19” dengan indikator “Kamar Mandi/WC yang baik dan layak” dan 3 indikator lainnnya, serta sasaran strategis “Tersedianya tenaga guru pada tingkat Pendidikan dasar merata dan relevan” dengan indikator "Jumlah guru SD terpenuhi” dan 2 indiktor lainnya
- d. Terdapat sasaran strategis dan indikator PD yang belum berorientasi hasil sesuai dengan level jabatannya. Contohnya PK Kepala Dinas PUTR Tahun 2024 yaitu Sasaran Strategis “Terpilihnya Bangunan Gedung Pemerintah” dengan indikator kinerja “Berfungsinya Bangunan Gedung Pemerintah” dan Target “5 Unit” serta PK Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 yaitu



- sasaran strategis “Terlaksananya kegiatan yang mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah” dengan indikator Kinerja “Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja”
- e. Terdapat indikator kinerja pada PK PD belum memenuhi kriteria spesifik, terukur (*measurable*), relevan, dan cukup untuk mengukur capaian yaitu sasaran strategis. Contohnya PK Kepada Dinas Kesehatan Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular dan Penyakit Tidak menular” dengan indikator kinerja “Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)”. Contoh lainnya pada PK Kepala Dinas PUTR Tahun 2024 yaitu sasaran strategis “terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)” dengan indikator kinerja “Ketaatan dan Kesesuaian RTRW”
 - f. Penetapan rencana aksi yang disusun pada Sebagian besar PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK
 - g. *Cascading*/penjenjangan kinerja yang telah disusun di level PD belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya. Contohnya pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketenagakerjaan.



2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah melakukan pengukuran kinerja. Dan saat ini sedang menyusun draft pedoman pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang digunakan di level Pemda maupun PD

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a. IKU PD hasil reviu/perbaikan belum ditetapkan dan belum dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data untuk mengetahui cara pengumpulan dan penghitungan indikator kinerjanya. Contohnya pada IKU milik Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual, belum memanfaatkan teknologi informasi
- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang

3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada tingkat pemda yang terintegrasi dalam Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan laporan Kinerja PD. Laporan Kinerja Pemda juga telah diunggah melalui *website* Pemerintah Kabupaten Simalungun. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah



diperjanjikan, perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, target jangka menengah. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut ;

- a. Penyajian laporan kinerja PD tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, analisis efisiensi sumber daya, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya. Contohnya pada laporan Pemda, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipanm dinaas Komunikasi dan Informatika.
- b. Penjabaran informasi dalam laporan kinerja PD terdapat kesalahan, sehingga analisis atas capaian kinerja tidak valid dan memberikan rekomendasi yang tidak sesuai. Contohnya pada seluruh indikator kinerja dalam laporan kinerja Dinas Ketenagakerjaan. Contoh lainnya pada laporan kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023 yang menyajikan tabel kinerjanya dengan judul “Capaian Realisasi Program Tahun 2023 Semester I”
- c. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Bupati Simalungun Tahun 2024, yaitu indikator kinerja “Laju Pertumbuhan



Ekonomi” dengan target tahun 2024 adalah 3.67 sedangkan relisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2023 telah mencapai 5.07. contoh lain yang serupa yaitu indikator “LPE Kategori Industri Pengolah” Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan” dan “Indeks Gini”

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh PD dan pelaksanaannya telah mengacu pada PERMENPAN-RI nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal diantaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil ebaluasi intenal belum sepenuhnya tepat menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD. Contohnya pada Dina Pendidikan dengan nilai 65.76 (predikat B) dan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai 65.78 (Predikat B) tetapi masih banyak catatan dan belum memenuhi kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP
- b. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP
- c. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja PD



- d. Belum ada kebijakan *reward* dan *punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan PK tahun berjaan pada setiap PD dari level tertinggi sampai level terendah melalui esr.menpan.go.id agar dapat dipastikan penjenjangan kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi
- 2) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi orientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus di selesaikan
- 3) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya
- 4) Memastikan rencana aksi yang disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru dan mereviu rencana aksi PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut
- 5) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *CSF* dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan



- 6) Menetapkan IKU pada seluruh PD dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan serta sumber data yang relevan untuk setiap indikator kinerja
- 7) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pemantauan kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)
- 8) Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*
- 9) Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja organisasi, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- 10) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya
- 11) Menyajikan data *bachmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional sebagai bahan perbandingan untuk melihat posisi capaian kinerja yang dicapai
- 12) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta



memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan

- 13) Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan professional judgement secara tepat, memberikan simpulan hasil evaluasi yang menggambarkan kondisi real penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD
- 14) Membuat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan implementasi SAKIP di Level PD

- **Indikator 3: Opini BPK**

Indikator Kinerja Opini BPK dengan Realisasi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) merupakan hasil yang memuaskan bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun, hal ini sesuai dengan surat dari BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara tanggal 27 Mei 2024, Nomor: 176.b/S/XVIII.MDN/05/2024, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan bahwa Opini Atas Laporan Keuangan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian** (WTP). hasil ini adalah merupakan opini Tahun 2023, sedangkan untuk tahun 2024 masih dalam proses audit dan dalam prses penilaian.



Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab. Simalungun dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektifitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun rekomendasi BPK yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten simalungun adalah sebagai berikut:

1. Kepala Disdik lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas belanja peralatan dan mesin dan memproses kelebihan pembayaran pada CV. MJ dan menyetor ke rekening kas daerah sebesar Rp. 1.049.087.752,32 (Rp. 656.740.145,12+Rp. 392.347.612,20)
2. Kepala Dinas PUTR, Dinas Perpustakaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)m disdik lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian PPK.
3. Kepala Dinas PUTR, dinas Perpustakaan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), disdik memproses kelebihan pembayaran menyetor ke kas daerah sebesar Rp. 1.058.510.366,07 (Rp. 220.830.964,57 + Rp.181.259.103,63 + Rp. 220.995.026,26 + Rp. 435.425.271,61)
4. Kepala Dinas PUTR lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dan memproses kelebihan pembayaran di lingkungan sataun kerjanya dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp. 649.899.302,75, memperhitngkan potensi kelebihan pembayaran pada termin pembayaran berikutnya sebesar Rp.



342.187.391,05 serta melakukan perbaikan pada Sebagian pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis tahun 2018 revisi 2 pada paket pekerjaan jalan irigasi dan jaringan CV. ABSM sebesar Rp. 75.397.913,31, dan

5. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dan penyelesaian permasalahan aset tetap pada LHP BPK tahun sebelumnya



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 Mei 2024

Nomor : 174.b/S/XXVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran (TA) 2023

Yth. Bupati Simalungun
Di
Pematang Raya

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun TA 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Simalungun dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Simalungun TA 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- a. Kelebihan pembayaran pengadaan mebel untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan (Disdik) sebesar Rp1.049.087.757,32;
- b. Kekurangan volume dan kualitas atas 32 paket pekerjaan belanja modal gedung dan Bangunan pada Empat SKPD sebesar Rp1.058.510.366,07 serta sembilan paket pekerjaan jalan dan dua paket pekerjaan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp1.067.484.607,11; dan
- c. Pemkab Simalungun belum sepenuhnya dapat menyelesaikan rekomendasi LHP BPK tahun sebelumnya atas permasalahan aset tetap sebesar Rp26.445.730.861,59, yang

Gambar: Screenshot Surat Keputusan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara Tentang laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Simalungun TA.2023



• **Indikator 4: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Simalungun adalah sebesar **70.152** dengan **Predikat Perlu Perbaikan** dan Nilai **B** namun ini masih menggunakan data yang di rilis pada tahun 2023. Indkes ini di terbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/35/KPTS/2025 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari 6 (enam) dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komparasi dengan rata-rata nasional serta standar deviasi dari nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Utara yang didapat dari website Badan Strategi Kebijaksanaan Dalam negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia <http://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id> yang dikelompokkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah yang meliputi kategori penilaian yang meliputi:

- a. Predikat Baik dengan nilai A;
- b. Predikat Perlu Perbaikan dengan nilai B; dan
- c. Predikat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/35/KPTS/2025

TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi atau sebutan lain melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD pemerintah kabupaten/kota kepada Menteri paling lambat Bulan Juli tahun berikutnya;

c. bahwa berdasarkan Surat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3/5930/BSKDN tanggal 3 Desember 2024, hal Penyampaian SK Gubernur atas hasil pengukuran IPKD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;

NO	KOTA	DIMENSI				DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PREDIKAT	NILAI
		1	2	3	4				
1	PEMATANGSIANTAR	11,391	19,656	10,603	13,333	5,910	75,893	Perlu Perbaikan	B
2	PADANGSIDIMPUAN	9,831	20	7,759	15	3,403	70,993	Perlu Perbaikan	B
3	BINJAI	10,937	20	7,759	13,333	3,050	65,084	Perlu Perbaikan	B
4	TANJUNG BALAI	8,470	12,586	14,741	13,333	3,714	57,854	Sangat Perlu Perbaikan	C
		RATA-RATA NASIONAL					73,189		
		STANDAR DEVIASI NASIONAL					8,448		

NO	KABUPATEN	DIMENSI				DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	PREDIKAT	NILAI
		1	2	3	4				
		RATA-RATA NASIONAL							
		STANDAR DEVIASI NASIONAL							

Gambar: Screenshoot Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang hasil pengikiran IPKD Pemerintah Kabupaten Kota Se-Sumatera Utara TA. 2023

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.77
Perbandingan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	40,47 (C)	45.58 (C)	45.71	CC (61.67)	62,47	101%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	43,47 (C)	45.00 (CC)	(50.01) (CC)	(60.00) CC	CC (52.12)	86%
	Opini BPK		WDP	WDP	WTP	WTP	100%
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		-	75.00	75.00	70.512 (Tahun 2023)	94%



Pada RPJMD 2021-2026 indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengalami peningkatan yang stabil, namun demikian pada tiap tahunnya realisasi yang di peroleh tidak sesuai target dari yang di ditetapkan melalui RPJMD, seperti pada tahun 2023, realisasi yang diperoleh sebesar 50.01 sedangkan target yang akan di sasar adalah sebesar 55 55.00 (CC) begitu pula dengan tahun 2024 target yang akan di sasar adalah 60.00 (CC) tetapi realisasi yang diperoleh adalah sebesar 52.02 (CC).

Selanjutnya pada indikator Opini Keuangan BPK, pada tahun 2022-2023 mendapatkan opini WDP, opini yang didapat pada tahun 2022-2023 yang merupakan opini dengan beberapa catatan diantaranya adalah perbaikan, penyempurnaan/sistem kebijaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat, melaksanakan inventaris aset daerah. Keseluruhan rekomendasi dari BPK ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sehingga pada tahun 2024 mendapatkan Opini WTP

Berikutnya adalah indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pada tahun 2023 mendapatkan nilai B dengan skor 70.512 dengan predikat perlu perbaikan. Sementara untuk tahun 2024 menggunakan data dari tahun sebelumnya yakni data 2023 dengan nilai indeks 70.512

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 - 2026



Tabel 3.78
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	62,47 (B)	66.67 (B)	93%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	CC (52.12)	70.00 (B)	74%
	Opini BPK	WTP	WTP	-
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70.512	75	94%

Pada sasaran meingkatkan kualitas layanan dan inovasi daerah, ada beberapa indikator yang sudah mencapai atas target akhir resntar yakni tahun 2026 seperti pada indikator Opini BPK. Pada target akhir resnta target yang akan di sasar adalah opini WTP, tetapi pada tahun 2024 Kabupaten Simalungun telah mendapatkan opini dari BPK yakni WTP. Selanjutnya untuk indikator lainnya pada sasaran ini masih belum mencapai target dari akhir resnta. Dengan sisa waktu kurang dari 2 tahun Pemerintah Kabupaten Simalungun berupaya untuk mencapai target target tersebut yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisa Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan saat ini belum masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun, hal ini di sebabkan tidak adanya standar nasional. Walau demikian beberapa indikator tersebu tetap mengacu kepada peraturan yang telah di terbitkan oleh Instansi Pengampu ataupun yang



menerbitkan hasil pengukuran dari indeks-indeks tersebut seperti :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- c. Opini BPK yang mengacu pada hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK
- d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya juga mengikuti surat edaran dari Gubernur Provinsi masing masing daerah
- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**



Tabel 3.79
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kualitas
Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024
serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (61.67)	62,47 (B)	101%	Keberhasilan realisasi dari indikator ini didasarkan dua faktor yakni RB General dan RB Tematik, meningkatnya indeks RB Kabupaten Simalungun tahun 2024 yang besar dalam menopang nilai adalah dari RB General sebesar 52,71 sedangkan untuk RB Tematik adalah sebesar 9,76. Walau demikian masih banyak catatan dan rekomendasi untuk indikator di RB Tematik dan RB General yang harus di perbaiki dan di penuhi pada tahun 2025	Meningkatn Kulitns Pelaporan dan Juga Evaluasi Internal di Pemerintah Kab. Simalungun untuk tahun tahun berikutnya. Peningkatan kualitas pelaporan diantaranya adalah dengan mengisi RENAksi GENERAL dan Juga RENAksi Tematik
Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)		(60.00) CC	CC (52.12)	86%	Tidak tercapainya terget dari Indikatr ini disebabkan masih adanya ketidak terkaitan antara sasaran kinerja di PD dengan indikator kinerja PD seperti yang tertuang dalam Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024, dari hasil evaluasi ini juga ditujukan masih banyak perlu perbaikan walau tidak mendasar khususnya pada perangkat darah	Meningkatkan kulitas dari perencanaan, pengukuran, palporan dan juga evaluasi atas laporan AKIP di tahun beriktunya	
Opini BPK		WTP	WTP	100%	Keberhasilan atas capain ini merukakan kerjas sama yang baik dengan menjalankan dan melaksanakan rekomendasi LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun TA. 2023. Pelaksanaan rekomendasi tersebut diantaranya adalah dengan mendata seluruh aset yang ada di pemerintah kabupaten simalungun dari	Melaksanakan rekomendasi BPK yang tertuang dalam hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2024	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
						beberapa perangkat daerah diantaranya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75.00	70.512 (Tahun 2023)	94%	Keberhasilan IPKD tidak terlepas dari 6 dimensi yang di nilai oleh Kemendagri. Dari 6 (enam) dimensi tersebut seleurhnya tergolong baik sehingga Nilai IKPD Kabupaten Simalungun berada pada angka 70.152	Beberapa Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Simalungun di tahun tahun beiktunya guna meningkatkan IPKD adalah dengan meningkatkan kualitas SDM, penereapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, pemanfaatn teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan juga pengendalian internal di Pemerintah Kabupaten Simalungun

3.1.3.10. Sasaran 10, Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah

**Tabel 3.80
Realisasi dan Capaian Indikator Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumber Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67.00	85.17	127%	Sangat Memuaskan	SKM Pemkab. Simalungun Tahun 2024
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Nilai	30.10	41.49)	137%	Sangat Memuaskan	https://indeks.inovasi.bskdn.kehendagri.go.id/login dan Surat Keputusan Kemendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024



a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah

• Indikator : Indeks Kepuasannya Masyarakat

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85.17, hasil realisasi ini didapatkan dengan mengakumulasi IKM dari 21 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024. Penyusunan IKM ini juga di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. selain itu Kabupaten Simalungun juga mendapatkan zona hijau dari Ombudsman RI atas Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun 2024 dengan Nilai sebesar 91.46 dengan zona Hijau dan Kualitas Tertinggi, hal ini sesuai dengan surat Keputusan

Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik).



Gambar: Penyerahana Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2024 Oleh Ombudman



Gambar: Penyerahana Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2024 Oleh Ombudman

Selain itu pula Pemerintah Kabupaten Simalungun mendapatkan Indeks Pelayanan Publik dari Kemepan-rb RI dengan nilai 4.11 dengan kategori A-, hal ini juga sesuai dengan Keputusan Menteri PAN_RB RI Nomor: 659 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024

Nilai dan Indeks ya dicapai pada tahun 2024 tidak terlepas dari menigktanya SDM yang ada di perangkat daerah terutama PD yang menjalankan Pelayanan Publik dan yang bersentuhan dengan masyarakat. Semakin membaiknya indeks Pelayanan Publik dari tahun ketahun semakin menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat akan pelayanan ya diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun kepada Masyarakat di Kabupaten Simalungun



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 252 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024
 (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 kepada penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);

5. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik);

-17-

154.	Pemerintah Kutai Barat	Kab.	91,48	Hijau	A	Kualitas Tinggi
155.	Pemerintah Simalungun	Kab.	91,46	Hijau	A	Kualitas Tinggi
156.	Pemerintah Tanjung Jabung Barat	Kab.	91,46	Hijau	A	Kualitas Tinggi
157.	Pemerintah Bengkulu Tengah	Kab.	91,33	Hijau	A	Kualitas Tinggi
158.	Pemerintah Kuningan	Kab.	91,3	Hijau	A	Kualitas Tinggi
159.	Pemerintah Kab. Nias Selatan	Kab.	91,23	Hijau	A	Kualitas Tinggi
160.	Pemerintah Pasaman	Kab.	91,23	Hijau	A	Kualitas Tinggi
161.	Pemerintah Dharmasraya	Kab.	91,14	Hijau	A	Kualitas Tinggi
162.	Pemerintah Tangerang	Kab.	91,1	Hijau	A	Kualitas Tinggi
163.	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	Kab.	90,91	Hijau	A	Kualitas Tinggi
164.	Pemerintah Tanggamus	Kab.	90,84	Hijau	A	Kualitas Tinggi
165.	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	Kab.	90,8	Hijau	A	Kualitas Tinggi
166.	Pemerintah Kolaka Timur	Kab.	90,79	Hijau	A	Kualitas Tinggi
167.	Pemerintah Mukomuko	Kab.	90,64	Hijau	A	Kualitas Tinggi
168.	Pemerintah Berau	Kab.	90,63	Hijau	A	Kualitas Tinggi
169.	Pemerintah Minahasa Utara	Kab.	90,61	Hijau	A	Kualitas Tinggi
170.	Pemerintah Sarolangun	Kab.	90,53	Hijau	A	Kualitas Tinggi
171.	Pemerintah Karimun	Kab.	90,48	Hijau	A	Kualitas Tinggi
172.	Pemerintah Maluku Tengah	Kab.	90,47	Hijau	A	Kualitas Tinggi
173.	Pemerintah Mesuji	Kab.	90,45	Hijau	A	Kualitas Tinggi
174.	Pemerintah Lampung Utara	Kab.	90,43	Hijau	A	Kualitas Tinggi
175.	Pemerintah Lampung Timur	Kab.	90,28	Hijau	A	Kualitas Tinggi
176.	Pemerintah Minahasa Selatan	Kab.	90,27	Hijau	A	Kualitas Tinggi
177.	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	Kab.	90,24	Hijau	A	Kualitas Tinggi
178.	Pemerintah Kab. Aceh Besar	Kab.	90,23	Hijau	A	Kualitas Tinggi

Gambar: Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 KEPUTUSAN
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 697 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024;

b. bahwa hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik lingkup pemerintah daerah tahun 2024, telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

-20-

NO	DAFTAR KABUPATEN	IPP DINAS SOSIAL	IPP RSUD	IPP DISKONKAPAL	IPP KABUPATEN	KATEGORI
131	Kabupaten Serang	4,16	4,20	4,1	4,15	A
132	Kabupaten Ogan Komering Lili Selatan	3,86	4,22	4,25	4,14	A
133	Kabupaten Sukoharjo	3,84	4,26	4,21	4,14	A
134	Kabupaten Bantul	4,18	4,14	4,08	4,13	A
135	Kabupaten Pasaman	3,68	4,16	4,54	4,13	A
136	Kabupaten Bujur	4,26	4,27	3,84	4,12	A
137	Kabupaten Bangkulu	3,92	4,09	4,13	4,11	A
138	Kabupaten Bangkulu Tengah	4,02	4,18	4,14	4,11	A
139	Kabupaten Kutai Timur	4,39	3,96	3,99	4,11	A
140	Kabupaten Kutai Barat	3,90	4,19	4,24	4,11	A
141	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,70	4,15	4,08	4,11	A
142	Kabupaten Padang Lawas	4,35	4,08	3,88	4,10	A
143	Kabupaten Padang Lawas Selatan	3,81	4,22	4,17	4,10	A
144	Kabupaten Pemang	4,13	4,48	3,68	4,10	A
145	Kabupaten Kemuning	4,02	4,09	4,18	4,10	A
146	Kabupaten Buhawato	4,07	4,11	4,08	4,09	A
147	Kabupaten Bengkulu	4,07	4,04	4,22	4,09	A
148	Kabupaten Aceh Tenggara	4,00	4,04	4,1	4,08	A
149	Kabupaten Aceh Tenggara	4,06	4,09	4,1	4,08	A
150	Kabupaten Mesuji	3,80	4,66	3,76	4,07	A
151	Kabupaten Empat Lawang	3,80				A

Gambar: Surat Keputusan MENPAN-RB RI Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024



• **Indikator: Indeks Inovasi Daerah**

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tahun 2024 mendapatkan kategori Inovatif, dengan nilai 41.49, hasil ini didapat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-4849 Tahun 2024 Tentang Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Tersebut, Pengukuran IGA ini didasarkan pada Laporan dan informasi dan inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran indeks inovasi daerah yang telah di validasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) scientific Modeling, Application Research, and Training fot city Centered Inovation and Tecnhnology (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.

SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 - 4898 TAHUN 2024

TENTANG
INDEKS INOVASI DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2024

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap laporan penerapan inovasi daerah dan mengusulkan calon penerima penghargaan inovasi daerah;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

-7-

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
246	Kabupaten Simalungun	41,49	Inovatif
247	Kabupaten Cusman	41,38	Inovatif
248	Kabupaten Kepulauan Anambas	41,36	Inovatif
249	Kabupaten Sokol	41,35	Inovatif
250	Kabupaten Banggai Laut	40,89	Inovatif
251	Kabupaten Pulau Morotai	40,66	Inovatif
252	Kabupaten Maluku Barat Daya	40,66	Inovatif
253	Kabupaten Timor Tengah Utara	40,61	Inovatif
254	Kabupaten Melawi	40,59	Inovatif
255	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	40,51	Inovatif
256	Kabupaten Kaur	40,45	Inovatif
257	Kabupaten Merauke	40,26	Inovatif
258	Kabupaten Rote Ndao	40,18	Inovatif
259	Kabupaten Lendak	40,09	Inovatif
260	Kabupaten Marowali Utara	39,99	Inovatif
261	Kabupaten Halmahera Barat	39,84	Inovatif
262	Kabupaten Toli-Toli	39,81	Inovatif
263	Kabupaten Toba	39,74	Inovatif
264	Kabupaten Aceh Selatan	39,68	Inovatif
265	Kabupaten Kepahiang	39,68	Inovatif
266	Kabupaten Bungo	39,66	Inovatif
267	Kabupaten Barito Timur	39,62	Inovatif
268	Kabupaten Barito Kuala	39,40	Inovatif
269	Kabupaten Konawe Kepulauan	39,34	Inovatif
270	Kabupaten Bener Meriah	39,25	Inovatif
271	Kabupaten Bombana	38,85	Inovatif
272	Kabupaten Simeulue	38,81	Inovatif
273	Kabupaten Rokan Hilir	38,63	Inovatif
274	Kabupaten Padang Lawas Utara	38,62	Inovatif
275	Kabupaten Sukamara	38,60	Inovatif
276	Kabupaten Aceh Utara	38,60	Inovatif
277	Kabupaten Lembata	38,26	Inovatif
278	Kabupaten Lebong	38,26	Inovatif
279	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	38,17	Inovatif
280	Kabupaten Sigi	38,14	Inovatif
281	Kabupaten Kupang	37,80	Inovatif
282	Kabupaten Murung Raya	37,80	Inovatif
283	Kabupaten Bengkalis	37,78	Inovatif
284	Kabupaten Kotawaringin Barat	37,77	Inovatif
285	Kabupaten Buton Selatan	37,75	Inovatif
286	Kabupaten Penajam Paser Utara	37,61	Inovatif
287	Kabupaten Seruyan	37,58	Inovatif
288	Kabupaten Kayong Utara	37,37	Inovatif
289	Kabupaten Kepulauan Mentawai	37,04	Inovatif
290	Kabupaten Serang	36,90	Inovatif
291	Kabupaten Buru	36,73	Inovatif
292	Kabupaten Timor Tengah Selatan	36,69	Inovatif
293	Kabupaten Bantang	36,69	Inovatif
294	Kabupaten Lamandau	36,39	Inovatif
295	Kabupaten Batanghari	36,25	Inovatif
296	Kabupaten Merangin	36,18	Inovatif
297	Kabupaten Majene	36,02	Inovatif

Gambar: Keputusan MENDAGRI Tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024



Selain itu Peningkatan Layanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan juga selalu diterapkan mulai dari inovasi yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, Dinas Sosial yang juga bersentuhan dengan masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut merupakan bagian dari inovasi di bidang pelayanan public.

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.81
Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85.4	84.43	Indeks	67.00	85.17
	Indeks Inovasi Daerah (IGA)	-	Kurang Inovatif	41.30 Inovatif	Nilai	30.10	41.49

• **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Peningkatan IKM dengan tahun sebelumnya meningkat sekitar 1 point, peningkatan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 tersebut dikarenakan pemerintah kabupaten berusaha semaksimal mungkin dalam hal peningkatan kualitas pelayanan baik dari sisi pelayanan dan juga peningkatan kualitas SDM di PD yang membidangi pelayanan kepada masyarakat



- **Indeks Inovasi Daerah (IGA)**

Pada tahun 2023 IGA Kabupaten Simalungun sebesar 41.30 dengan predikta inovatif, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai indeks yakni 41.49, terjadi peningkatan 0.19 point. Pemerintah kabupaten simalungun terus berusaha meningkatkan kualitas dan inovasi yang ada baik dari sisi peningkatan layanan public, tata kelola pemerintahan dan juga pembangunan. Secara bertahap Pemerintah Kabupaten Simalungun optimis akan mendapatkan hasil yang lebih di tiap tahunnya.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.82
Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.17	70	104%
	Indeks Inovasi Daerah (IGA)	41.49	30.90	102%

- **Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pada RPJMD 2021-2026 Target yang akan di sasar pada indikator IKM ini adalah sebesar 70, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 85.69. realisasi yang di dapatkan pada tahun 2024 telah melebihi target akhir RPJMD, hasil yang baik ini diperoleh dengan terus meningkatkan pelayanan public dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap oemerintah kabupaten simalungun lewat



program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti Pembangunan dan Perbaikan jalan yang terus di tingkatkan, pelayanan dari DISDUKCAPIL yang langsung turun ke tengah tengah masyarakat lewat aksi Marharoan Bolon (Gotong Royong) untuk membangun simalungun.

- **Indikator : Indeks Inovasi Daerah (IGA)**

Indeks Inovasi Daerah (IGA) Kabupaten Simalungun pada Target RPJMD sampai dengan tahun 2026 adalah sebesar 30.90, pada tahun 2024 realisasi yang diperoleh sebesar 41.49. realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 melebihi target tahun 2026 yang tertuang di RPJMD. Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya meningkatkan Inovasi Daerah dengan meningkatkan kualitas inovasi baik dari Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan juga Pembangunan. Inovasi yang dilakukan diantaranya adalah Pelayanan public yang di lakukan oleh DISDUKCAPIL dengan bekerjasama dengan PT.POS Indonesia dengan aksi mengantarkan dokumen Kependudukan langsung ke masyarakat dengan menggunakan jasa PT. POS Indonesia

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian IKM dan IGA



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.83
Analisis Keberhasilan/kegagalan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah sampai dengan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	67.00	85.17	Keberhasilan dari Indikator IKM ini tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah kabupaten Simalungun dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Selain dari sisi aksi yang diberikan kepada masyarakat, Peningkatan Kualitas SDM juga li tingkatkan dengan mengikutsertakan pelaksana pelayanan public dalam pelatihan dan juga pembinaan. Seperti yang di lakukan di beberapa puskesmas dalam peningkatan kualitas strander pelayanan public yang di lakukan oleh Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara	
		Indeks Inovasi Daerah (IGA)	Nilai	30.10	41.49)	Pencapaian realisasi dari indikator IGA tahun 2024 melebihi dari target tahun 2024 yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian ini didapat dengan meningkatkan inovasi baik dari Pelayanan public, tata kelola pemerintahan dan juga pembangunan.	



3.1.3.11. Sasaran 11, Meningkatnya Kualitas Infastruktur Jalan

Indikator 1: Indeks Kualitas Layanan Infrastuktur

Tabel 3.84
Relisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastuktur Jalan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumbe Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Meningkatnya Kualitas Infastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	Indeks	22.47	-	-	-	Dinas PUTR Kab. Simalungun

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infastruktur Jalan Tahun 2024

Indeks Kuliatas Layanan Infrastuktur untuk tahun 2024 belum dilaksanakan oleh Dinas yang mengampu survei tersebut. Survei Indeks layanan kualitas infastruktur Kabupaten Simalungun untuk tahun 2024 masih dalam pelaksanaan survei. Walau demikian beberapa capaian untuk mendukung program Bupati Simalungun telah dilakasnakan diantaranya peningkatan kondisi jalan dalam keadaan mantap selain itu juga perbaikan irigasi untuk lahan pertanian juga di tingkatkan.

Total Panjang Kabupaten Simalungun adalah 1.803,78 Km, jalan yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 544,50 Km sedangkan 372,83 Km dalam kondisi sedang. Dengan demikian persentase kondisi jalan mantab Kabupaten Simalungun adalah 50,86%



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pamatang Raya, 21162

Format Data Pendukung
IKK 1-5-7

**TINGKAT KEMAMPUAN JALAN
DI KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024**

No.	Name Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Perawatan (Ha)							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			km	%	km	%	km	%	km	%
1	0101 JL. PERKANTORAN SKPD PAMATANG RAYA	6,41	6,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0102 JL. LINGKAR KOTA PAMATANG RAYA	4,68	4,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0103 JL. MARTINI, PAMATANG RAYA	0,73	0,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0104 JL. CIK ALINAFIAH, PAMATANG RAYA	0,12	0,00	0,00	0,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0105 JL. SALAJIN SARAGIH (KSL BETHESDA), PAMATANG RAYA	0,67	0,00	0,00	0,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0106 JL. CIK PAMATANG RAYA	1,17	0,97	82,91	0,00	0,00	0,20	17,09	0,00	0,00
7	0107 JL. DIASAMEN SARAGIH, PAMATANG RAYA	0,25	0,00	0,00	0,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0108 JL. KAPTEN AMIR, PAMATANG RAYA	0,90	0,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0109 JL. KARMEN PURBA, PAMATANG RAYA	0,26	0,06	23,26	0,20	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0110 JL. SAMBIN, SONDI RAYA	0,48	0,00	0,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0111 JL. GAMP, SONDI RAYA	0,21	0,00	0,00	0,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0112 RUAS SPOD - AMAN RAYA/ PASAR RAYA.	1,47	1,07	72,79	0,40	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0113 RUAS PEMATANG RAYA - TAMBUK MASISI	3,80	2,40	63,16	1,20	31,58	0,00	0,00	0,20	5,26
14	0114 RUAS TANJUNG MARGAH - TAMBUK MASISI	10,20	2,40	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	76,47
15	0115 RUAS BINTANG MARGAH - BANGUN TANI	4,20	4,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0116 RUAS SOMP. RAYA HULIAN - PARTUAMAN	15,02	9,42	62,72	5,00	33,29	0,00	0,00	0,60	3,99
17	0117 RUAS SP. PANGALBUAN - KARIAHAN.	11,57	9,17	79,26	2,40	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0118 RUAS KARUHAN - PARAPAT HULLIAN	13,82	2,62	18,96	9,00	65,12	0,00	0,00	2,20	15,92
19	0119 RUAS SP. SIGONRANG - SIKOU HULLIAN SP. MARJANG DOLOK	6,06	0,40	6,60	0,40	6,60	0,00	0,00	5,26	86,80
20	0120 RUAS SIKOU HULLIAN SP. MARJANG DOLOK - HUTA SAENG	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	100,00
21	0121 RUAS SONDI RAYA - BAHAPAL RAYA - RAYA SOGI	14,12	0,60	4,25	2,40	17,00	1,20	8,50	9,92	70,25
22	0122 RUAS MEREK RAYA - LIMAG - RUMA PALA	4,87	1,00	20,53	0,80	16,43	0,00	0,00	3,07	63,04
23	0123 RUAS MEREK RAYA - PADANG BULAN - LOHEK	4,06	1,80	44,33	1,00	24,63	0,00	0,00	1,26	31,03
24	0124 RUAS MEREK RAYA - BARINGIN RAYA	5,90	0,40	7,27	1,40	25,45	0,00	0,00	3,70	62,27
25	0125 RUAS RAYA BAYU/ SP. SILOTTING - SOMBUL	3,60	1,00	27,78	0,40	11,11	0,00	0,00	2,20	61,11
26	0126 RUAS RAYA TONGAH - SOMBUL	1,71	0,51	29,82	0,40	23,39	0,00	0,00	0,80	46,78
27	0127 RUAS SIPOKAS - MAPPU	1,50	0,00	0,00	0,10	6,67	0,00	0,00	1,40	93,33
28	0128 RUAS SOMP. YONDANG - GUBING	4,04	0,00	0,00	2,20	54,46	0,20	4,95	1,64	40,59
29	0129 RUAS PAMATANG RAYA - DOLOK KASIAN RAYA	1,62	0,60	37,04	1,02	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Name Ruas Jalan	Panjang Ruas (Km)	Perawatan (Ha)							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			km	%	km	%	km	%	km	%
440	3113 RUAS APO BURU TUROHAN - BURU MARUHAT	1,18	0,00	0,00	0,20	16,95	0,00	0,00	1,00	84,05
441	3113 RUAS BUKU BERTANG SOMP. BURU MARUHAT - BURU MARUHAT	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	100,00
442	3114 RUAS SOMP. POS KEDUFANAN - ARI KENDAH SOMP. BURU MARUHAT - ARI KENDAH SOMP. BURU MARUHAT - ARI KENDAH SOMP. BURU MARUHAT	1,00	0,20	20,00	1,70	170,00	0,00	0,00	1,10	110,00
443	3115 RUAS SOMP. KUTE - ARI KENDAH SOMP. BURU MARUHAT	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	100,00
444	3116 RUAS SOMP. PULUWANGI POS - HUTA BENDUNGAN BIKAT	2,88	1,88	65,28	1,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3117 RUAS BURU BAYU	6,62	2,62	39,00	0,80	12,00	0,00	0,00	3,20	48,00
446	3118 RUAS SOMP. TALUN KARAS - PANGKALAN	9,34	0,20	2,14	2,24	24,00	0,00	0,00	6,90	73,86
447	3119 RUAS KAMPUNG BARU TALUN KARAS	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	100,00
448	3120 RUAS JAWA TONGAH - PANGKALAN MARUHAT	2,37	0,00	0,00	1,00	42,19	0,00	0,00	1,37	57,81
Jumlah		1.803,76	544,36	30,19	372,83	20,67	44,49	2,47	842,96	46,46

Jalan Kondisi Harap

Baik	544,36	30,19
Sedang	372,83	20,67
Jumlah	917,19	50,86

Perumahan (Ha) Januari 2025
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIMALUNGUN
[Signature]
NIP. 197903200640002

Gambar: Screenshoot tabel Kondisi Jalan Kab. Simalungun tahun 2024
Sumber: Dinas PUTR Kab. Simalungun 2025

Pemerintah Kabupaten Simalungun memfokuskan pada perbaikan jalan sebagai salah satu bagian dari peningkatan akses perekonomian masyarakat. Tidak hanya itu dengan kondisi jalan yang baik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses beberapa hal seperti akses Pendidikan dan juga Kesehatan. Dengan baiknya akses infrastruktur berupa jalan maka akan berdampak baik bagi masyarakat dengan meningkatnya kualitas Pendidikan dan juga kualitas pelayanan Kesehatan dan juga pelayanan public yang di berikan pemerintah kepada masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Simalungun
Pamatang Raya, 21162

Format Data Pendukung
Pembtang - BK 1-c-3

LUAS IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA YANG DILAYANI OLEH JARINGAN IRIGASI
YANG DIBANGUN, DITINGKATKAN, DIREHABILITASI, DIPERKERAS DAN PELIHARA DI TAHUN EKSTISTING
DI KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN 2024

No.	Nama Irigasi	Lokasi		Luas (Ha)	Penanganan (Ha)					Ket.
		Desa	Kacamatan		Dibangun	Ditingkatkan	Direhabilitasi	Diperkeras dan Dipelembaga	Jumlah	
1.	D.I. AIG. C Bah Kiser (55 Ha)		Taroh Jawa	55			15	15	15	Aktif
2.	D.I. AIG. III Bah Jambi (160 Ha)		Taroh Jawa	160			125	125	125	Aktif
3.	D.I. AIG. Naga Huta (74 Ha)		Panombean	74			10	10	10	Aktif
4.	D.I. Ambarisan (100 Ha)		Sidamank	100			100	100	100	Aktif
5.	D.I. Andarash (50 Ha)		Taroh Jawa	40			30	30	30	Aktif
6.	D.I. Bah Birona Huta (90 Ha)		Jodang Hataran	90			55	55	55	Aktif
7.	D.I. Bah Bikon (91 Ha)		Bawa	91			85	85	85	Aktif
8.	D.I. Bah B. Jawa (722 Ha)		Panal	272			147	147	147	Aktif
9.	D.I. Bah Hata I-II (290 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambur	280			260	260	260	Aktif
10.	D.I. Bah Hatal Raya (55 Ha)		Bawa	55			10	10	10	Aktif
11.	D.I. Bah Hatal (70 Ha)		Taroh Jawa	70			60	60	60	Aktif
12.	D.I. Bah Kiser/Dokok Maraja (760 Ha)		Dokok Pamribuan	760			760	760	760	Aktif
13.	D.I. Bah Korah I/Simpang Panel (496 Ha)		Panel	496			371	371	371	Aktif
14.	D.I. Bah Lumbu III (833 Ha)		Huta Bayu Raja	833			830	830	830	Aktif
15.	D.I. Bah Samangan (160 Ha)		Jodang Hataran	160			120	120	120	Aktif
16.	D.I. Bah Tamasan I-II (900 Ha)		Sidamank	900			200	200	200	Aktif
17.	D.I. Bah Tongguran III Huta Bawa (754 Ha)		Huta Bayu Raja	754			750	750	750	Aktif
18.	D.I. Bahl Gajah/Tiga Bafan (430 Ha)		Sidamank	430			430	430	430	Aktif
19.	D.I. Bahung Kahaan (235 Ha)		Dokok Batu	235			170	170	170	Aktif
20.	D.I. Bahata Uluwa Raja (360 Ha)		Jodang Hataran	360			200	200	200	Aktif
21.	D.I. Bander Huta (260 Ha)		Jodang Hataran	260			20	20	20	Aktif
22.	D.I. Bander Makha/Siau Malda (197 Ha)		Gunung Malda	197			197	197	197	Aktif
23.	D.I. Bander Manik (80 Ha)		Pamatang	80			80	80	80	Aktif
24.	D.I. Bander Tengah Bawah/Bah Gunung (506 Ha)		Bandar Hutaan	556			450	450	450	Aktif
25.	D.I. Bemas (203 Ha)		Jawa Maraja Bah Jambur	203			195	195	195	Aktif
26.	D.I. Batu III Siau Malda/Batu Tonok II (43 Ha)		Gunung Malda	142			142	142	142	Aktif
27.	D.I. Batu IV Parikwan/Laras II (760 Ha)		Siantar	760			760	760	760	Aktif
28.	D.I. Bewang Sura/Bandar Jawa (199 Ha)		Jodang Hataran	199			100	100	100	Aktif
29.	D.I. Blok V (40 Ha)		Panel	40			-	-	-	Tidak aktif
30.	D.I. Bona Raya (280 Ha)		Huta Bayu Raja	280			275	275	275	Aktif
31.	D.I. Bona Rajana (250 Ha)		Huta Bayu Raja	250			240	240	240	Aktif
32.	D.I. Bumi Hutaan (10 Ha)		Hatornduan	10			-	-	-	Tidak aktif
33.	D.I. Bumi Langan (280 Ha)		Hatornduan	280			50	50	50	Aktif
34.	D.I. Cindek (100 Ha)		Dokok Siau	100			100	100	100	Aktif
35.	D.I. Hala Bawa (120 Ha)		Bawa	120			12	12	12	Aktif
36.	D.I. Dokok Malda/Bandan (444 Ha)		Gunung Malda	444			444	444	444	Aktif
37.	D.I. Dokok Marawan (260 Ha)		Jodang Hataran	260			195	195	195	Aktif
38.	D.I. Dokok Pamribuan (75 Ha)		Bandar Hutaan	75			60	60	60	Aktif

No.	Nama Irigasi	Lokasi		Luas (Ha)	Penanganan (Ha)					Ket.		
		Desa	Kecamatan		Dibangun	Ditingkatkan	Direhabilitasi	Diperkeras dan Dipelembaga	Jumlah			
144.	D.I. Sitabu (40 Ha)		Girsang	40					40	40	Aktif	
145.	D.I. Sitampulu (270 Ha)		Sisanaan Bikon	270					200	200	Aktif	
146.	D.I. Sitangapan (68 Ha)		Taroh Jawa	68					-	-	Tidak aktif	
147.	D.I. Sorba Dokok I (30 Ha)		Raya Kahaan	30					-	-	Tidak aktif	
148.	D.I. Sorang Bikon/Panaktangan (117 Ha)		Ujung Padang	117					-	-	Tidak aktif	
149.	D.I. Sukasari (100 Ha)		Gunung Malda	100					100	100	Aktif	
150.	D.I. Taki Lapan (166 Ha)		Ujung Padang	166					68	68	Aktif	
151.	D.I. Takon Kondot (180 Ha)		Panombean	180					80	80	Aktif	
152.	D.I. Tambun Timur (50 Ha)		Bawa	50					50	50	Aktif	
153.	D.I. Tanoa Batu (15 Ha)		Gunung Malda	15					-	-	Tidak aktif	
154.	D.I. Taming Selaman (115 Ha)		Hatornduan	115					80	15	95	Aktif
155.	D.I. Tarasak Nagoosaha (210 Ha)		Ujung Padang	210					150	150	Aktif	
156.	D.I. Tondama Raya (70 Ha)		Raya	70					50	50	Aktif	
157.	D.I. Tomogora (50 Ha)		Gunung Malda	50					10	10	Aktif	
158.	D.I. Ujung Pait (933 Ha)		Pamatang	933					850	850	Aktif	
Jumlah				31.363	0	0	2.100	23.412	25.512			

Pamatang Raya, Januari 2025
NIPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIMALUNGUN
[Signature]
NIP. 19750253006041002

Gambar: Screenshot Luas Irigasi kewenangan Pemkab. Simalungun yang di rehabilitasi
Sumber: Dinas PUTR, Kab. Simalungun 2025

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.85
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	-	-	-	22.47	-	

Perbandingan realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021,2022 dan 2023 tidak



dapat dilakukan, sebab pada awal RPJMD 2021 Perhitungan Indeks Kuliats Layanan Infrastruktur beum dilakukan. Dan perhitungan Indeks tersebut baru dilakukan tahun 2025 dengan metode Survey dan kuesioner yang di sebar ke masyarakat.

Walau demikianp persentase kondisi jalan mantap dan jugap persentase luas jaringan irigasi aliran irigasi permukiman kewenangan daerah dapat ditampilkan perbandingannya dengan tahun 2023.

Tabel 3.86
Perbandingan Kondisi Infrastruktur tahun 2024
dengan tahun 2023

No	Kondisi Infrastuktru	Tahun	
		2023	2024
1	Persentase Kondisi Jalan Mantap	34%	50,86 %
2	Persentase Jaringan Irigasi Permukiman Kewenangan Daerah yang di rehabilitasi	55.60%	81%

Peningkatan persentase kondisi jalan mantap dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 16,86% atau meningkat 1,49% jika di dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun 2023, sedangkan persentase jaringan irigasi permukiman kewenangan daerah yang di rehabilitas peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 adalah sebesar 55,60% atau meningkat 1,45% jika dibandingkan antara tahun 2024 dan tahun 2023

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026



Tabel 3.87
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan target akhir RPJMD Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4) x 100%
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	-	22,94	-

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan standar Provinsi atau Nasional sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.88
Analisis Keberhasilan / kegagalan realisasi kinerja Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan	Indeks Kulaitas Layanan Infrastuktur	22.47	-	-	Belum adanya data dan survei yang dilakukan pada indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur sehinga realisasi yang akan di sasar dari target tahun 2024 juga belum dapat didapat.	Melakukan survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur pada tahun tahun berikutnya sebagai bagian dari pemenuhan data indikator Kinerja Utama. Selain itu Indeks juga diperlukan untuk



							mengetahui sejauh mana kualitas layanan infrastruktur yang dirasakan oleh masyarakat di Kab. Simaungun
--	--	--	--	--	--	--	--

4. Sasaran 12, Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator 1: Indeks Resiko Bencana

Tabel 3.89
Relisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian Kinerja (%)	Interpretasi	Sumbe Data
			Satuan	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Indeks	72.50	80.07	89%	Memuaskan	BNPB

a. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Indikator indeks risiko bencana (IRBI) adalah ukuran tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah. Indikator ini didasarkan pada perbandingan antara potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah. Indikator-indikator yang digunakan untuk menghitung IRBI meliputi:

- Ancaman, seperti kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, dan kebakaran hutan
- Kerentanan, seperti kerentanan masyarakat terhadap bencana
- Kapasitas, seperti kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

Nilai IRBI menunjukkan kemampuan daerah dalam upaya penanggulangan bencana. Semakin tinggi nilai



IRBI, maka semakin rendah upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Manfaat IRBI adalah:

- Memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- Memberikan panduan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana
- Membantu meningkatkan ketangguhan masyarakat.

Pada tahun 2024 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Simalungun berada pada angka 89.07 selain itu Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Simalungun adalah sebesar 0.22, hal ini Berdasarkan surat BNPB Tanggal 8 Januari 2025 Nomor B-06.02/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025

Selain itu ketahanan wilayah terhadap dampak kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor dari resiko bencana, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun Tahun 2024 adalah sebesar 66.87 dari terget yang di disasar dari RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup adalah Sebesar 67.43, Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari (IKA 30%) + (IKU 30%) + (ITH 40%). Pada tahun 2024 Indeks Kuaitas Air sebesar 53.33, kemudia Indeks Kualitas Udara sebesar 95.62 dan Indek Tutupan Lahan adalah Sebesar 36.69.





BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
 Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
 Situs: <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

Nomor : B-06.02/BNPB/D-ISS.01.03/01/2025 8 Januari 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penyampaian IKD 2024 dan IRB 2024 di Provinsi Sumatera Utara

Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di tempat

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2024 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2024 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://linarisk.bnpb.go.id/admin>. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal berikut:

- BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Sumatera Utara yang telah konsisten mendorong dan melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota untuk melakukan penilaian IKD setiap tahun;
- BNPB juga memberikan apresiasi terhadap BPBD Kabupaten/Kota yang telah melakukan penilaian IKD pada 2024, sebagaimana terlampir;
- BNPB telah menyampaikan surat Nomor B-500/BNPB/D-ISS.01.03/12/2024. Dalam surat tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memperpanjang waktu pengumpulan dan pemenuhan bukti verifikasi;
- BNPB telah melakukan finalisasi pada IKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir. File final IKD 2024 dapat diakses pada tautan https://bit.ly/IKD_Final_Sumatera_Utara_2024;
- Nilai IRB 2024 diproses dengan input salah satunya adalah nilai IKD 2024. Nilai IRB 2024 untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 139,84;
- BNPB menghimbau Provinsi Sumatera Utara melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara untuk mengkoordinasikan pengumpulan IKD Kabupaten/Kota serta melakukan pendampingan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Bidang Sistem dan Strategi,

 Radhika Jati

Tembusan :

- Kepala BNPB (sebagai laporan);
- Sekretaris Utama BNPB;
- Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Utara.

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran : B-06.02/BNPB/D-ISS.01.03/01/2025
 Nomor : 8 Januari 2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

Nilai IKD 2024 dan IRB 2024 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IKD 2024	IRB 2024
Nias	Tidak menilai	211,70
Manisailing Natal	0,29	214,80
Taparuli Selatan	0,53	141,20
Taparuli Tengah	0,37	181,49
Taparuli Utara	0,35	115,33
Toba Samosir	0,27	107,20
Labuhanbatu	0,28	151,20
Asahan	0,35	148,57
Simalungun	0,22	80,07
Dairi	0,43	116,00
Karo	0,48	110,22
Delit Serdang	Tidak menilai	121,26
Langkat	0,27	142,62
Nias Selatan	0,24	199,97
Humbang Hasundutan	0,33	127,20
Pakpak Bharat	0,42	106,26
Samosir	0,30	114,00
Serdang Bedagai	0,34	124,00
Batu Bara	0,27	143,20
Padang Lawas Utara	0,30	137,70
Padang Lawas	Tidak menilai	152,76
Labuhanbatu Selatan	0,25	131,20
Labuhanbatu Utara	0,29	155,20
Nias Utara	Tidak menilai	214,00
Nias Barat	Tidak menilai	210,80
Kota Sibolga	0,33	165,92
Kota Tanjung Balai	0,37	107,26
Kota Pematangsiantar	0,24	91,20
Kota Tebing Tinggi	0,44	90,05
Kota Medan	0,70	84,50
Kota Binjai	0,22	103,20
Kota Padang Sidimpuan	0,38	122,57
Kota Gunungsitoli	0,39	199,01

Kepala Bidang Sistem dan Strategi,

 Radhika Jati

Gambar: Screenshoot Surat Kepala BNPB tentang Penyampaian IKD dan IPB tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui DLH melakukan pengukuran indeks tersebut bertujuan untuk Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah untuk mengukur kualitas lingkungan hidup dan memberikan informasi untuk pengambilan kebijakan. IKLH juga dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan lingkungan hidup

Selain itu Tujuan IKLH:

- Memberikan gambaran kondisi lingkungan hidup
- Memberikan pertanggungjawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Mengukur keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup

- Merumuskan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup
- Mendukung perencanaan pembangunan
- Mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup



Gambar: Pegujian Kualitas Air di PTPN Regional III dan Pengujian Kulitias Udara di Mitra DLH Kab. Simalungun

b. Membandingkan antara Realisasi Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.90
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kulaitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	-	80.07	80.7	72.50	80.07	89%



c. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen RPJMD 2021 – 2026

Tabel 3.91
Perbandingan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis (2026)	Tingkat Kemajuan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = $(4 / 3) \times 100\%$
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	80.07	71.50	90%

Pada target akhir RPJMD dari Indikator Indeks Resiko Bencana nilai indeks yang akan di sasar adalah sebesar 71.50, sementara pada tahun 2024 realisasi yang di dapat adalah sebesar 80.07 dengan capaian tingkat kemajuan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD adalah sebesar 90%. Dengan semakin kecilnya angka indeks resiko bencana maka dapat dikatakan semakin minimnya angka resiko bencana di Kabupaten Simalungun.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sampai dengan saat ini masih berdasarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Simalungun itu sendiri, hal ini disebabkan tidak ada standar nasional yang ditetapkan dalam target Kinerja untk pencapaian Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, hal ini juga di dasarkan pada kemampuan daerah dalam mengantisipasi bencana dan juga kewaspadaan bencana di Kabupaten Simalungun



e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup sampai dengan Tahun 2024 serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Tabel 3.92
Analisis Keberhasilan/Kegagalan atas Realisasi Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	72.50	80.07	89%	Kesiapan daerah yang masih kurang dalam kesiapsiagaan bencana masih masnjdi perhatian penting. Selain itu kesadaran masyarakat akan sadar bencana masih harus di tingkatkan Beberapa diantaranya seperti tidak membakar lahan pertanian, memperhatikan lokasi tempat tinggal pakah deka dengan darah rawan bencana tau tidak, dan juga kesadaran akan kebersihan lingkungan di sekit Kawasan pemukiman masyarakat	Melaukan pemenuhan dokumen sebagai bagian dari Penilaian IRB BPBD selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Simalungun terus melakukan Upaya sosialisasi di daerah rawan bencana, baik itu bencana longsor, banjir maupun pemukiman padat penduduk yang beresiko terjadinya kebakara. Sosialisasi juga dilakukan kepada sekolah baik di tingak SD sampai SMA

**3.2. Realisasi Anggaran**

Tabel 3.93
Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah TA. 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
PENDAPATAN DAERAH	2.823.940.101.547	2.646.938.402.344,96	93,73	2.390.180.674.082,12
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	192.965.342.278	219.923.021.464,96	113,97	170.619.769.576,12
PENDAPATAN TRANSFER	2.598.626.561.617	2.394.298.529.632,00	92,14	2.176.970.598.063,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.348.197.652	32.716.851.248,00	101,14	42.590.306.443,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	18.668.029.548,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	18.668.029.548,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	18.668.029.548,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	18.668.029.548,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.348.197.652	32.716.851.248,00	101,14	23.922.276.895,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	32.348.197.652	32.716.851.248,00	101,14	23.922.276.895,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	32.348.197.652	32.716.851.248,00	101,14	23.922.276.895,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	32.348.197.652	32.716.851.248,00	101,14	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	0,00	0,00	0,00	23.922.276.895,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.348.197.652,00	32.716.851.248,00	101,14	42.590.306.443,00
JUMLAH PENDAPATAN	2.823.940.101.547,00	2.646.938.402.344,96	93,73	2.390.180.674.082,12

Tabel 3.94
Realisasi Belanja TA. 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	2.947.435.592.653,00	2.657.709.012.035,83	90,17	2.465.601.699.084,14
BELANJA OPERASI	2.064.403.879.709,00	1.792.094.066.702,63	86,81	1.516.114.211.151,14
Belanja Pegawai	1.127.084.031.428,00	964.985.141.154,00	85,62	862.658.455.847,00
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	821.406.277.956,00	683.626.023.589,00	83,23	594.599.548.456,74
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.262.837.681,00	94.994.114.536,00	83,14	82.267.039.219,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.123.528.618,00	160.855.051.481,00	98,01	159.043.653.984,26
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.248.864.173,00	24.616.543.606,00	93,78	25.774.897.767,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	190.523.000,00	172.127.942,00	90,34	171.716.420,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	721.280.000,00	84,66	801.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa	828.893.895.281,00	725.004.496.544,63	87,47	585.159.116.100,14
Belanja Barang	243.434.458.129,00	200.989.682.962,00	82,56	127.545.095.808,71
Belanja Jasa	310.207.720.046,00	266.654.271.533,63	85,96	241.922.909.317,56
Belanja Pemeliharaan	79.093.231.634,00	73.809.472.587,00	93,32	38.922.737.284,00
Belanja Perjalanan Dinas	94.200.820.892,00	77.904.716.289,00	82,70	68.402.917.791,00



URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.576.185.000,00	8.251.756.623,00	78,02	12.861.009.600,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	70.381.479.580,00	69.981.035.601,00	99,43	75.271.597.005,87
Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.000.000.000,00	27.413.560.949,00	130,54	20.232.849.293,00
Belanja Hibah	107.835.953.000,00	101.603.079.004,00	94,22	67.809.337.107,00
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	59.507.220.000,00	59.507.220.000,00	100,00	32.101.480.000,00
Belanja Hibah kepada BUMN	3.996.000.000,00	3.996.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hibah kepada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.525.350.000,00	12.336.672.000,00	66,59	10.332.420.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	21.972.900.000,00	21.928.704.004,00	99,80	22.065.109.107,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.834.483.000,00	1.834.483.000,00	100,00	1.810.328.000,00
Belanja Bantuan Sosial	590.000.000,00	501.350.000,00	84,97	487.302.097,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	580.000.000,00	491.350.000,00	84,72	487.302.097,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	2.064.403.879.709,00	1.792.094.066.702,63	86,81	1.516.114.211.151,14
BELANJA MODAL	357.765.173.044,00	342.561.963.087,00	95,75	456.890.674.007,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56	24.570.763.800,00
Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56	24.570.763.800,00
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	23.000.000.000,00	20.827.969.248,00	90,56	24.570.763.800,00
BELANJA TRANSFER	502.266.539.900,00	502.225.012.998,20	99,99	468.026.050.126,00
Belanja Bagi Hasil	158.597.685.900,00	158.556.158.998,20	99,97	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	343.668.854.000,00	343.668.854.000,00	100,00	468.026.050.126,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	502.266.539.900,00	502.225.012.998,20	99,99	468.026.050.126,00
JUMLAH BELANJA	2.947.435.592.653,00	2.657.709.012.035,83	90,17	2.465.601.699.084,14
SURPLUS/DEFISIT	(123.495.491.106,00)	(10.770.609.690,87)	8,72	(75.421.025.002,02)
PEMBIAYAAN DAERAH	123.495.491.106,00	123.935.824.242,61	100,36	206.416.516.108,34
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.995.491.106,00	130.935.824.242,61	99,95	206.416.516.108,34
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	130.995.491.106,00	130.935.824.242,61	99,95	206.416.516.108,34
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	130.995.491.106,00	130.935.824.242,61	99,95	206.416.516.108,34
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	93,33	0,00
Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	93,33	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.000.000.000,00	93,33	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	123.495.491.106,00	123.935.824.242,61	100,36	206.416.516.108,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	113.165.214.551,74	0,00	130.995.491.106,32



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana amanah Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran tahun 2024. Laporan Kinerja tahun 2024 Terdiri dari 12 Sasaran dan 22 Indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam target kinerja Bupati yang tertuang dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026, secara umum Kabupaten Simalungun telah berusaha untuk mewujudkan capaian Sasaran Kinerja yang di maksud.

Pencapaian Sasaran Kinerja secara analisis pada indikator Sasaran berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN-RB terdapat keselarasan pada beberapa Indikator Sasaran dengan tujuan dan Sasaran, untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Simalungun telah di upayakan Langkah-langkah kebijakan dan strategi yang telah dilakukan. Secara keseluruhan dan secara umum capain Kinerja Pemerintah Kabupaten Simalungun termasuk dalam Kategori Baik. Berikut adalah simpulan kinerja Persasaran, yakni:

1. Sasaran 1 : “Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata Dearah dan Ekonomi Kreatif” dengan Indikator sasaran:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dengan terget 3.67 dan realisasi 4.89 dengan persentase capaian 133% dan dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - b. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan target 2.00 dan realisasi 0.78 dengan persentase capaian 39% dan dengan Interpretasi **Kurang**
 - c. LPE kategori Industri Pengolahan dengan target 2.53 dan realisasi 1.82 dengan persentase capaian 0.728% dan dengan Interpretasi **Sangat Baik**



2. Sasaran 2: “Meningkatnya Kesejahteraan Petani” dengan indikator sasaran Kontribusi (NTP) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan target 4.68 dan realisasi 5.26 dan dengan persentase capaian 112% dan dengan Sangat Memuaskan
3. Sasaran 3: “Meningkatnya Kondusivitas Pengembang Ikim Investasi Daerah indikator sasaran Persentase Peningkatan Investasi Daerah dengan target 4.8 dengan realisasi 14.54 dan dengan persentase capaian 302% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
4. Sasaran 4: “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” dengan indikator sasaran:
 - a. Tingkat Kemiskinan dengan target 7.49 dan realisasi 7.27 dan dengan persentase capaian 97% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan”**
 - b. Indeks Gini dengan target 0.270 dan realisasi tahun 2024 masih menggunakan indeks tahun 2023 yakni 0.2950 dan persentase capaian 91% serta interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - c. Pendapatan Perkapita dengan target 53.90 dengan realisasi 58.90 dan dengan persentase capaian 109% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
5. Sasaran 5 : “Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja” dengan Indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target 4.19 dan realisasi 6.12 dan dengan persentase capaian 65% serta dengan interpretasi **Cukup**
6. Sasaran 6: “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia dengan target 75.18 dan realisasi 75.88 dan dengan persentase capaian 100% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - b. Indeks Kesehatan dengan target 80.11 dan realisasi 79.85 dan dengan persentase capaian 99% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**



7. Sasaran 7: “Meningkatnya Kualitas dan daya saing Pendidikan yang berkeadilan dan kesetaraan gender” dengan indikator sasaran
 - a. Indeks Pendidikan dengan target 70.17 dan realisasi 93.00 dan dengan persentase capaian 132% serda dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - b. Indeks Pembangunan Gender dengan target 93.08 dan realisasi 93.09 dan dengan persentase capaian 100% serta dengan intepretasi **Sangat Memuaskan**
8. Sasaran 8: “Meningkatnya Produktivitas dan Kemandirian Pemuda yang Kompetitif” dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Pemuda dengan target 69.00 dan realisasi 49.55 dan dengan persentase capaian 82% serta dengan interpretasi **Memuaskan**
9. Sasaran 9: “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 61.67 dan realisasi 62.47 dan dengan persentase capaian 101% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - b. Nilai SAKIP dengan target 60.00 dan realisasi 52.02 dan dengan persentase capaian 86% serta dengan interpretasi **Memuaskan**
 - c. Opini BPK dengan target WTP dan realisasi tahun 2024 masih menggunakan opini tahun 2023 yakni WTP dan dengan persentase capaian 100% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
 - d. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 70.00 dan relisasri 70.152 dan dengan persentase capaian 94% serta dengan interpretasi **Sangat Memuaskan**
10. Sasaran 10 : “Meningktanya Kualitas Layanan dan Inovasi Daerah" dengan indikator sasaran
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 67.00 dan realisasi 85.00 dan dengan persentase capaian 127% serta dengan intpretasi **Sangat Memuaskan**



b. Indeks Inovasi Daerah dengan target 30.00 dan realisasi 41.49 dan dengan persentase capaian 132% serta dengan **Sangat Memuaskan**

11. Sasaran 11 : “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur” dengan Indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dengan target 22.47 dan realisasi 0 dan persentase capaian 0 serta dengan interpretasi **Sangat Kurang**

12. Sasaran 12: “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan indikator sasaran Indeks Resiko Bencana dengan target 72.50 dan realisasi 89.07 dan dengan persentase capaian 81% serta dengan interpretasi **Memuaskan**

Dari Uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 12 Sasaran dan 22 Indikator sasaran, tersirat jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2021-2026 dan bertekad membangun sistem pertanggung jawaban. Dari seluruh indikator sasaran dapat dirata-ratakan persentase capaian adalah sebesar 98% dengan nilai interpretasi rata-rata yakni **Sangat Memuaskan**

4.2. Rekomendasi

Harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius agar pencapaian kinerja Kabupaten Simalungun dapat sesuai target kinerja yang lebih baik dengan melakukan beberapa kegiatan perubahan. Berbagai kendala, hambatan serta keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang terlihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 ini akan memacu semangat seluruh ASN Kabupaten Simalungun untuk meraih hasil yang lebih baik lagi di masa yang akan datang baik di Tahun 2025 dan juga Tahun-tahun Berikutnya



Semoga laporan ini menjadi kajian bagi pemerintah Pusat dan Provinsi, agar Kabupaten Simalungun dapat melaksanakan Amanah masyarakat dengan baik dan juga dapat di pertanggung jawabkan. Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah pelaksana kebijakan Bupati dalam melaksanakan visi misinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang memiliki Semangat Baru, Unggul, Mandiri dan Berdaya Saing untuk Simalungun Maju

Pamatang Raya, 19 Mei 2025

Bupati Simalungun



Anton Achmad Saragih